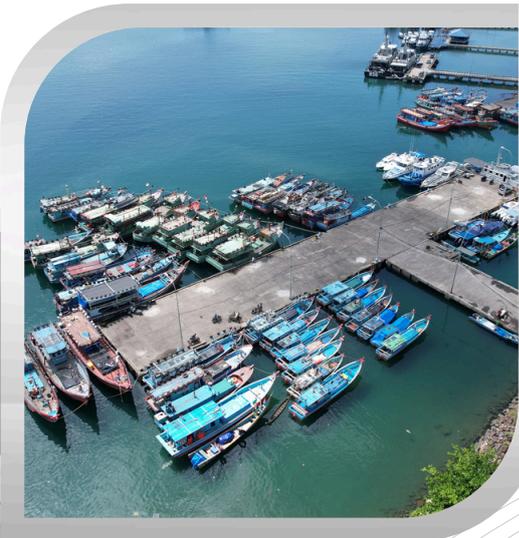


LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL: pps_bungus@yahoo.com



#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

djpt
bersinergi

PPS BUNGUS RANCAK
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

KATA PENGANTAR



Widodo, S.Pi, M.Sc
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus dilakukan peninjauan kembali agar dapat mencapai

keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggung jawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2024, Rencana Kinerja tahun 2024, dan Capaian Kinerja 2024. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

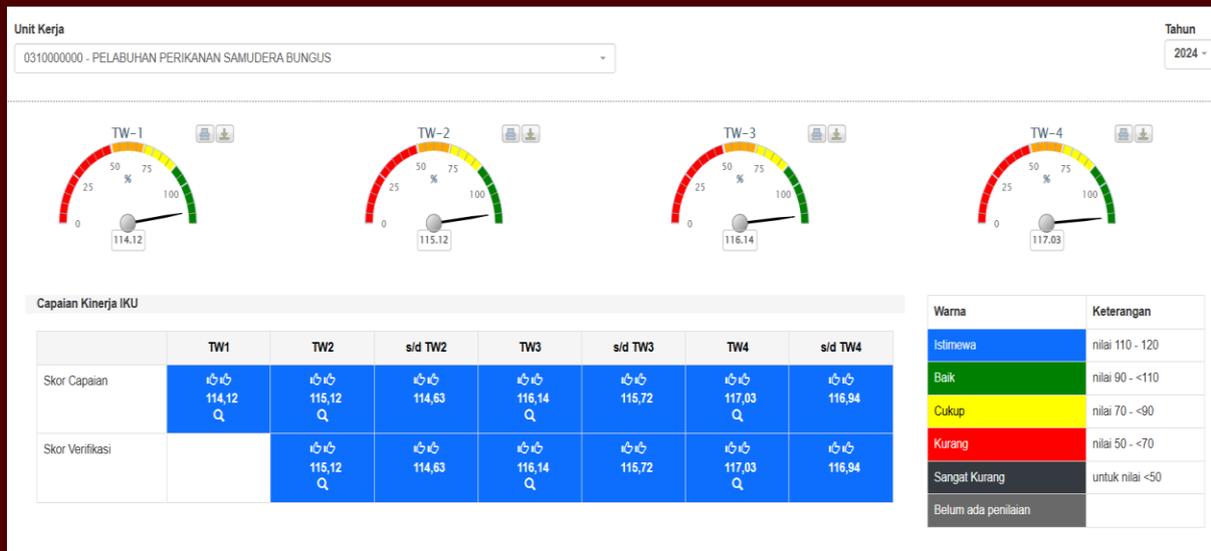
Bungus, 15 Januari 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus



Widodo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 16,528,231,000,- untuk Tahun 2024 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 16,116,039,056,- dengan persentase sebesar 97.51% sampai dengan akhir Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 117,03%.



Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Triwulan IV tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target Triwulan IV tahun 2024 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% di semua Indikator Kinerja yang ditargetkan (Indikator Kinerja Triwulan IV tahun 2024 Terlampaui).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan IV tahun 2024 dapat disajikan pada diagram diatas, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan IV pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
2.2.1. <i>Stakeholder Perspective</i>	8
2.2.2. <i>Customer Perspective (Output)</i>	9
2.2.3. <i>Internal Process Perspective (Process)</i>	9
2.2.4. <i>Learning and Growth Perspective (Input)</i>	9
2.3. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024	11
2.4. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA	17
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
BAB IV PENUTUP	70
4.1. KESIMPULAN	71
4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) PPS Bungus Tahun 2024	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2024.....	4
Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024.....	8
Gambar 4. Penerimaan PNBP 2024	18
Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024	19
Gambar 6. Perbandingan Realisasi Capaian	19
Gambar 7 Capaian Volume Produksi Tahun 2024.....	22
Gambar 8. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 – 2024.....	23
Gambar 9. Perbandingan Capaian	23
Gambar 10. Perbandingan dengan Satker Lain	27
Gambar 11 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2024	29
Gambar 12. Capaian PPS Bungus tahun 2020-2024.....	30
Gambar 13. Perbandingan Capaian	30
Gambar 14. Perbandingan dengan Satker Lain	32
Gambar 15. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024.....	32
Gambar 16. Perbandingan dengan Satker Lain	35
Gambar 17. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2024.....	37
Gambar 18. Perbandingan Dengan Tahun 2023	38
Gambar 19. Perbandingan dengan Satker Lain	38
Gambar 20. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah.....	40
Gambar 21. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya.....	40
Gambar 22. Perbandingan dengan Satker Lain	40
Gambar 23. Perbandingan Dengan Tahun 2023	43
Gambar 24. Perbandingan dengan Satker Lain	43
Gambar 25. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024	46
Gambar 26. Perbandingan Capaian	46
Gambar 27. Perbandingan Tahun Sebelumnya	52
Gambar 28. Perbandingan dengan Satker Lain	52
Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 - 2024	55
Gambar 30. Perbandingan Capaian	55
Gambar 31. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024	57
Gambar 32. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024	59
Gambar 33. Perbandingan Capaian	60
Gambar 34. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2023	62
Gambar 35. Perbandingan Capaian	62
Gambar 36. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	64
Gambar 37. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2024	66
Gambar 38. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	71

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024.....	10
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024.....	11
Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC).....	12
Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil Balanced Scorecard (BSC) Tahun 2024.....	15
Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus	17
Tabel 6. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	18
Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus.....	21
Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024	22
Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus.....	23
Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	25
Tabel 11. Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	26
Tabel 12. Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	28
Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	30
Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	31
Tabel 15. Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	32
Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	33
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	35
Tabel 18. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	37
Tabel 19. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	39
Tabel 20. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	40
Tabel 21. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	41
Tabel 22. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.....	42
Tabel 23. Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.....	44
Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	45
Tabel 25. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus	45
Tabel 26. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	48
Tabel 27. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024.....	49
Tabel 28. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	50
Tabel 29. Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	51

Tabel 30. Aspek Penilaian Lembar Kerja Rekonsiliasi.....	51
Tabel 31. Analisa Efisiensi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	53
Tabel 32 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	54
Tabel 33 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	57
Tabel 34. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	58
Tabel 35 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	59
Tabel 36. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	60
Tabel 37 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	62
Tabel 38. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	63
Tabel 39 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	64
Tabel 40. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	65
Tabel 41. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	66
Tabel 42. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera.....	67
Tabel 43. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024.....	69



PPS BUNGUS
RANCAK
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akunTabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari Triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama Triwulan III tahun 2024 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2024 dan Perjanjian Kinerja.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan

- 1) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- 3) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) Pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) Pemantauan wilayah pesisir;
- 11) Pengendalian lingkungan;
- 12) Kepabeanan; dan/atau
- 13) Keimigrasian.

Fungsi Perusahaan

- 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) Pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) Wisata bahari; dan/atau;
- 9) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2024

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, sebagai berikut :

Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Triwulan III tahun 2024 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2024 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2024 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



PPS BUNGUS
RANCAK
Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu bidang andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan”*** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan.
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

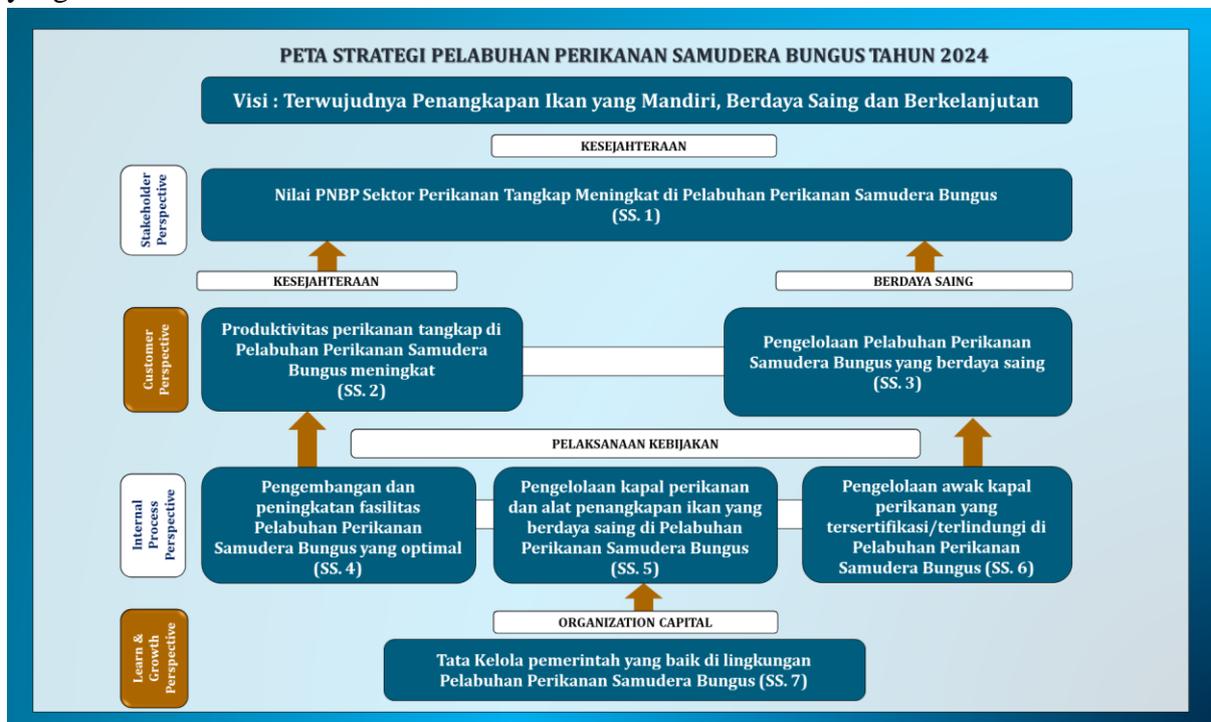
Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (tiga) perspektif, yaitu:

2.2.1. Stakeholder Perspective

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *stakeholder perspective* adalah Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan.

2.2.2. Customer Perspective (Output)

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam *customer perspective* adalah:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2.2.3. Internal Process Perspective (Process)

Sasaran strategis yang termasuk kedalam *internal process perspective* adalah:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
 - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan.

2.2.4. Learning and Growth Perspective (Input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat satu sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu adanya Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan.
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- c. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- d. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I Kepada Bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informasi Cascading/Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Perikanan Samudera Bungus	1.283,2	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	6.347	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	100	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Pelayanan Usaha
	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	84	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Operasional Pelabuhan
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	81	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	30,10	Triwulan	Rata-Rata	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	412	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).	30,15	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Kesyahbandaran Pelabuhan
	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	75	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	80	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	94	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	84	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76	Semesteran	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap;

2.3. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			2.685.031.000,-
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terselenggaranya Tata Kelola pemanfaatan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	38.000.000,-
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang profesional dan partisipatif	2.530.110.000,-
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	4.000.000,-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan	112.921.000,-
Program Dukungan Manajemen			13.843.200.000,-
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Terkelolanya anggaran pembangunan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara efisien dan akuntabel	13.843.200.000,-

2.4. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS Bungus pada tahun 2024, untuk semua sasaran strategis berjumlah 7 SS dan 18 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang disusun pada awal tahun 2024 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,2
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	100
		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81
		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10
		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal).	412
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30,15
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	75
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80

Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	94
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30



PPS BUNGUS
RANCAK

Responsif Akuntabel Normatif Cermat Adaptif Komitmen

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4. Capaian IKU PPS Bungus hasil *Balanced Scorecard* (BSC) Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				% CAPAIAN TW IV
		Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta).	1.283,2	400	700	1000	1.283,2	603,87	1.420,39	2.116,53	2.608,46	203,28%
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton).	6.347	1.550	3.100	4.650	6.347	1.853,01	3.839,28	6.146,77	8.260,07	130,14%
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi (Persen).	100				100				100	100%
	4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	84	84	84	84	84	84,58	89,58	91,33	91,08	108,43%
	5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	81				81				100,55	124,14%
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen).	57				57				100	175,44%
	7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai).	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	78,93	89,78	80,22	90,55	300,83%
5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal).	412	382	392	402	412	434	500	603	685	166,26%
6. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen).	30,15				30,15				39,81	132,04%

7. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.	10	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai)	75				75				76,56	102,08%
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80	80	80	80	80	100	100	90,91	88	110%
	12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	94				94				98,78	105,09%
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84		80		84		74,22		92,99	110,70%
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80				80				96,29	120,36%
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80				80				90	112,50%
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76		83		93,76		85,93		93,91	100,16%
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71				71				90	126,76%
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	89,83	88,30	90,54	91,37	103,48%

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pada Triwulan IV Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah melaksanakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kinerja (SK) 1: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Indikator Nilai PNBP PPS Bungus adalah seluruh penerimaan PPS Bungus yang merupakan pelaksanaan dari fungsi pengusahaan PPS Bungus sebagai unit Pelaksanan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP PPS Bungus didasarkan pada PP Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Ada dua jenis penerimaan di PPS Bungus, yakni penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan fungsional di PPS Bungus, yaitu: Pelayanan Penggunaan tanah dan bangunan, tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan, pelayanan penggunaan peralatan pengolahan, pelayanan penggunaan transportasi, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan tambat untuk kepala non perikanan, pelayanan docking dengan perkerjaan, pelayanan perbaikan kapal, pelayanan pengadaan air, pelayanan bengkel pelayanan pas masuk harian, pelayanan pas masuk berlangganan, pelayanan kebersihan di kawasan pelabuhan, pelayanan kebersihan kolam pelabuhan, dan pendapat jasa lainnya.

Indikator Kinerja (IK) 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

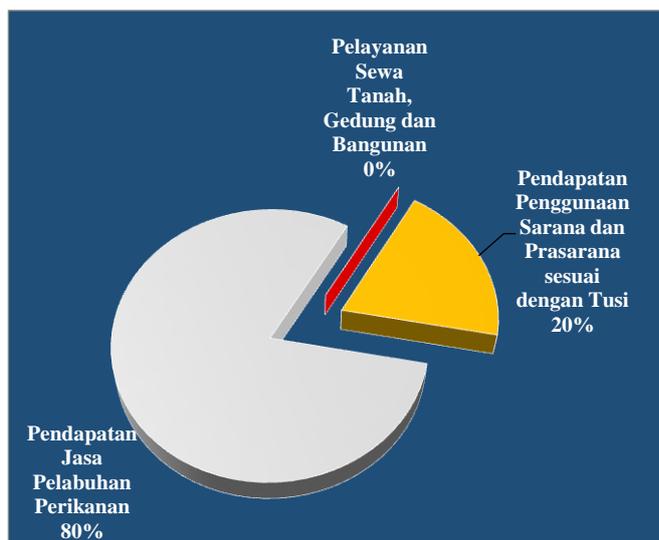
Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 5. Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus

Akun	Jenis Jasa	Target 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)
425131	Pelayanan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	317.175.000	512.081.472
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan Bangunan	115.650.000	56.509.155
	Tanah yang dipakai di kawasan Pelabuhan Perikanan	41.450.000	4.705.500
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	140.300.000	439.916.817
	Pelayanan peralatan di kawasan pelabuhan perikanan	7.500.000	7.200.000
	Pelayanan Penggunaan Peralatan Pengolahan	10.400.000	-

Akun	Jenis Jasa	Target 2024 (Rp.)	Realisasi Triwulan IV (Rp.)
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	1.875.000	3.750.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	966.029.000	2.096.377.523
	Pelayanan tambat untuk Kapal Perikanan	136.479.000	331.052.154
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Non Perikanan	476.600.000	485.531.961
	Pelayanan Docking dengan Pekerja	68.000.000	117.062.800
	Pelayanan Perbaikan Kapal	55.400.000	165.931.320
	Pelayanan Pengadaan Air	31.000.000	229.912.480
	Pelayanan Bengkel	1.800.000	2.300.000
	Pelayanan Pas Masuk Harian	70.000.000	65.408.000
	Pelayanan Pas Masuk Berlangganan	28.500.000	41.760.000
	Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan	7.650.000	20.098.476
	Pelayanan Kebersihan Kolam Pelabuhan	62.000.000	69.286.750
	Pendapatan Jasa Lainnya	28.600.000	568.033.582
TOTAL PENERIMAAN		1.283.204.000	2.608.458.995

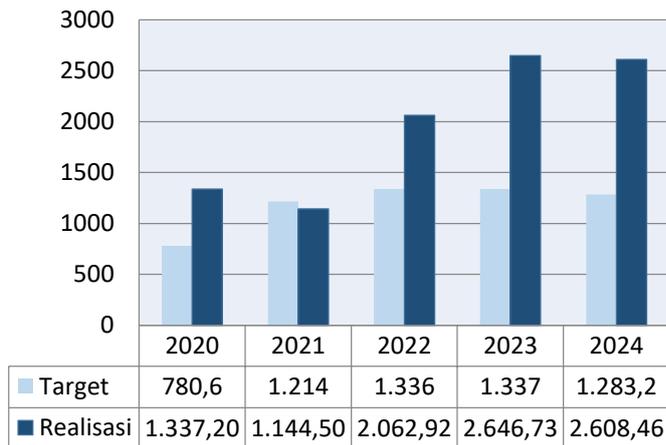


Gambar 4. Penerimaan PNBPN 2024

Realisasi PNBPN paling besar pada tahun 2024 berasal dari akun pendapatan jasa pelabuhan Perikanan dengan penerimaan terbanyak dari pelayanan tambat untuk kapal non perikanan sebesar Rp. 485.531.961,- (18,61%) dari total penerimaan tahun 2024. Sedangkan realisasi dari akun pendapatan penggunaan sarana dan prasarana, penerimaan terbanyak berasal dari Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 439.916.817,- atau sebesar 16,87% dari total penerimaan tahun 2024.

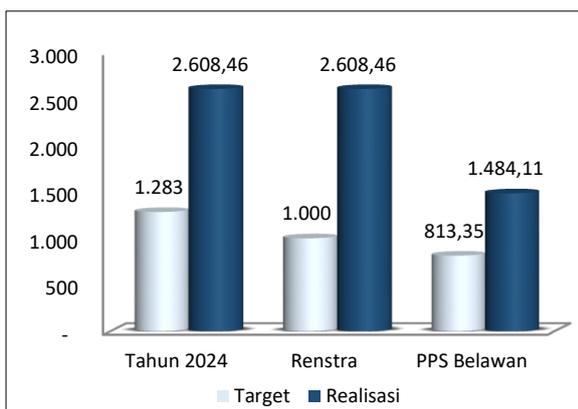
Tabel 6. Capaian Penerima PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 1	Penerimaan PNBPN Non SDA di PPS Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
263,55	1.144,50	2.062,92	2.646,73	2.608,46	1.283,20	2.608,46	203,28	1.000	2.646,73	



Gambar 5. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024

mencapai target yang ditetapkan sebesar 1.214 juta. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi operasional pelabuhan. Tahun 2022 menjadi titik balik dengan peningkatan signifikan, di mana realisasi penerimaan mencapai 2.062,92 juta, jauh melampaui target sebesar 1.336 juta. Ini menunjukkan adanya perbaikan besar dalam operasional pelabuhan, seperti peningkatan fasilitas dan layanan yang lebih optimal. Tren ini terus berlanjut pada 2023, di mana realisasi mencapai 2.646,73 juta, lebih dari dua kali lipat dari target yang hanya sebesar 1.337 juta. Ini merupakan tahun dengan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, menandakan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pelabuhan. Pada tahun 2024, meskipun target diturunkan sedikit menjadi 1.283,2 juta, realisasi penerimaan tetap tinggi, mencapai 2.608,46 juta. Pencapaian ini konsisten dengan tren peningkatan sejak 2022, menandakan bahwa PPS Bungus berhasil mempertahankan performa luar biasa dan terus mengoptimalkan pendapatan PNBP. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa setelah sedikit penurunan pada 2021, pelabuhan berhasil bangkit dan mencatat peningkatan penerimaan yang signifikan, dengan capaian yang selalu melebihi target selama tiga tahun terakhir.



Gambar 6. Perbandingan Realisasi Capaian

Berdasarkan data lima tahun terakhir penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai 1.337,2 juta, jauh di atas target sebesar 780,6 juta, mencerminkan awal yang positif dalam pengelolaan pelabuhan meskipun mungkin ada tantangan global seperti pandemi. Namun, pada tahun 2021, realisasi menurun menjadi 1.144,5 juta dan tidak

Berdasarkan grafik perbandingan, capaian PNBP tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2024 mencapai 2.608,46 juta, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1.283,2 juta. Jika dihitung dalam persentase, capaian ini sebesar 203,3% dari target, menunjukkan keberhasilan pelabuhan dalam mengelola dan mengoptimalkan layanan yang tersedia sehingga mampu menghasilkan penerimaan lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) yang sebesar 1.000 juta, capaian ini juga sangat signifikan. PPS Bungus berhasil mencapai 260,8% dari target Renstra, yang menunjukkan bahwa pelabuhan ini tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui ekspektasi perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi dan strategi operasional yang sangat baik di PPS

Bungus. Ketika dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, yang merupakan satuan unit kerja setara, capaian PPS Bungus juga jauh lebih unggul. PPS Belawan memiliki target sebesar 813,35 juta dan realisasi sebesar 1.484,11 juta, dengan persentase capaian 182,4% dari target. Meskipun PPS Belawan juga berhasil melampaui targetnya, realisasi PNBP di PPS Bungus hampir dua kali lebih besar dari PPS Belawan, menandakan bahwa PPS Bungus mampu mencapai performa yang lebih optimal dibandingkan satker lain yang sejenis. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa PPS Bungus memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2024, baik dibandingkan dengan target tahunannya, target Renstra, maupun satker setara seperti PPS Belawan. Pencapaian ini mengindikasikan pengelolaan pelabuhan yang efektif, inovasi dalam pelayanan, serta potensi besar dalam meningkatkan penerimaan PNBP.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian Penerimaan PNBP Non SDA tahun 2024 di PPS Bungus didukung oleh komitmen dari petugas pelayanan jasa dan penagihan atas jasa pelayanan kepada stakeholder. Terlaksananya kegiatan pelayanan tambat untuk kapal non perikanan, pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, pelayanan tambat untuk kapal perikanan, pelayanan pengadaan air dan pelayanan perbaikan kapal dengan maksimal menjadi penunjang capaian PNBP tahun 2024 di Perikanan Samudera Bungus.

Dalam pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus masih menghadapi sejumlah permasalahan, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan. Hal ini menjadi tantangan utama yang masih mempengaruhi optimalisasi penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus saat ini. Kepatuhan yang rendah ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kewajiban mereka, yang berdampak negatif pada kelancaran operasional dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas pelabuhan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap perjanjian yang telah disepakati, melalui monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, penegakan aturan yang lebih tegas, serta pengawasan yang lebih ketat agar realisasi PNBP dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang berperan penting dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mencakup Pendampingan dan Supervisi Operasional. Pendampingan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha atau pegawai terkait, membantu mereka memahami dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang berlaku dengan lebih efisien. Melalui pendampingan, para pelaku usaha memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka, serta meminimalisir risiko kesalahan atau ketidakpatuhan. Sementara itu, Supervisi Operasional bertindak sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan. Supervisi ini meliputi pengawasan harian, audit berkala, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja. Dengan pengawasan yang konsisten dan sistematis, potensi pelanggaran atau penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani, sehingga mendukung pencapaian target IKU secara lebih efektif.

Kombinasi antara Pendampingan dan Supervisi Operasional menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur dan terkendali, memastikan setiap proses berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel. Hal ini tidak hanya mendukung langsung keberhasilan IKU, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Selain itu, program Pendampingan dan Supervisi Operasional juga berperan dalam membentuk budaya kerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas. Pendampingan yang berkesinambungan memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif, yang pada gilirannya akan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan atau perkembangan teknologi. Supervisi yang baik juga mendorong setiap individu dalam organisasi untuk lebih bertanggung jawab atas peran mereka, mengurangi peluang terjadinya kelalaian atau penyimpangan yang dapat menghambat kinerja operasional secara keseluruhan. Melalui penerapan kedua program ini, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan kinerja secara internal, tetapi juga menunjukkan daya saing yang lebih tinggi di tingkat eksternal. Pendekatan yang terfokus pada kualitas dan akuntabilitas ini memungkinkan organisasi merespons tantangan dengan lebih proaktif, serta membangun reputasi yang kuat dalam menjaga standar operasional yang tinggi.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu anggaran dan sumber daya manusia.

Anggaran

Tabel 7. Analisa Efisiensi IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP Non SDA di PPS Bungus	203,3%	119,210,000	118,898,250	242.353.930	123.455.680
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				104%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{104\%}{20} \times 50\right)$				310%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Penerimaan PNBP Non SDA sebesar Rp. 118,898,250,- atau sekitar 99,74% dari total anggaran Rp. 119,210,000,- dengan tingkat efisiensi RO sebesar 104% dan nilai efisiensi 310%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung oleh Tim Petugas Pelayanan Publik, yang terdiri dari 11 orang pegawai petugas Pelayanan Jasa PNBP. Terdapat pegawai yang memegang lebih dari satu jenis pelayanan Jasa. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya aplikasi Sistem Jasa

Kepelabuhanan (SIJAKA) yang telah terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh.

Sasaran Kinerja (SK) 2: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat

Sasaran kinerja kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

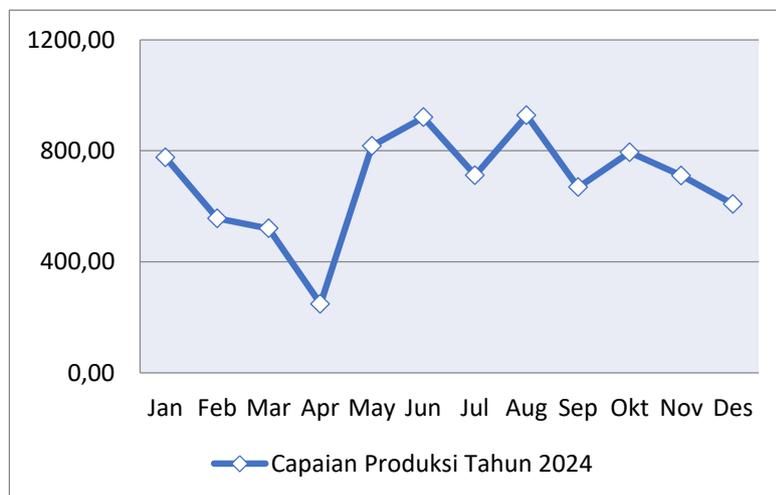
Indikator Kinerja (IK) 2 – Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPS Bungus. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Pendataan di Pelabuhan Perikanan. Pendataan dilaksanakan oleh petugas pendataan terhadap produksi ikan yang didaratkan dengan menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi, selanjutnya diolah oleh petugas pengelola data, serta dilaporkan secara berkala, baik harian, bulanan, dan triwulanan sebagai bentuk realisasi produksi perikanan tangkap.

Target dan Realisasi

Tabel 8. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2024

No	Bulan	Volume Jumlah Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1	Januari	775,72	7.068.189.000
2	Februari	556,79	5.736.793.000
3	Maret	520,50	5.638.154.000
4	April	248,50	2.941.161.000
5	Mei	817,51	8.871.914.000
6	Juni	920,26	9.757.392.000
7	Juli	711,81	9.186.581.000
8	Agustus	927,22	9.919.985.000
9	September	668,46	9.697.389.000
10	Oktober	794,56	9.951.366.000
11	November	710,42	7.937.626.000
12	Desember	608,32	6.370.503.000
Total		8.260,07	93.077.053.000



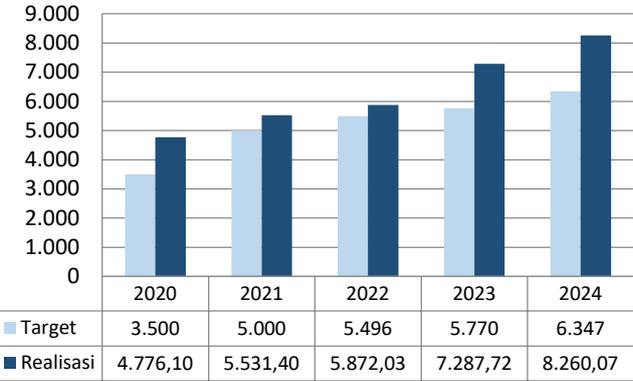
Gambar 7 Capaian Volume Produksi Tahun 2024

Berdasarkan grafik ini dapat terlihat bahwa Produksi tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan signifikan pada awal tahun, terutama pada bulan April yang mencapai titik terendah (248,50 ton). Produksi kemudian pulih secara drastis pada bulan Mei (817,51 ton) dan mencapai puncaknya di bulan Agustus (927,22 ton). Pada triwulan IV cenderung lebih stabil, meskipun terdapat

sedikit penurunan di akhir tahun. Total produksi sepanjang tahun adalah 8.260,07 ton, dengan rata-rata bulanan 688,34 ton. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan di awal tahun yang disebabkan oleh faktor musiman atau operasional, sementara pemulihan di pertengahan tahun mencerminkan perbaikan yang efektif. Stabilitas di akhir tahun memberikan peluang untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi dengan mengelola fluktuasi secara lebih baik.

Tabel 9. Capaian Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

SK 2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Meningkat									
IK 2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
4.776,1	5.531,4	5.872,03	7.287,72	8.260,07	6.347	8.260,07	130,14	1.000	8.260,07	

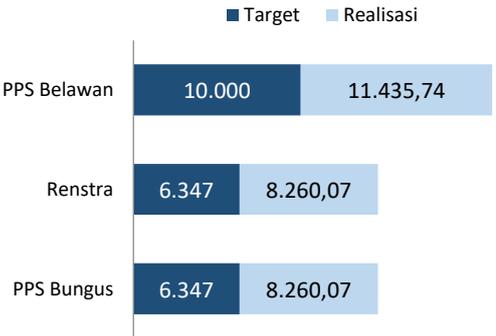


Gambar 8. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 – 2024

mencerminkan keyakinan terhadap kemampuan PPS Bungus untuk terus meningkatkan produksinya.

Berdasarkan data capaian produksi, terdapat perbedaan signifikan antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Realisasi produksi di PPS Bungus mencapai 8.260,07 ton, melampaui target sebesar 6.347 ton, dengan peningkatan sekitar 30%. Sementara itu, PPS Belawan mencatat realisasi yang lebih tinggi, yaitu 11.435,74 ton, melampaui targetnya sebesar 10.000 ton dengan peningkatan sekitar 14,4%. Meskipun PPS Bungus menunjukkan pencapaian yang lebih besar secara persentase dibandingkan target, PPS Belawan memiliki volume produksi yang jauh lebih tinggi secara absolut. Hal ini menunjukkan bahwa PPS Belawan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, sedangkan PPS Bungus menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam melampaui targetnya. Kedua lokasi ini mencerminkan kinerja yang baik, namun PPS Belawan berkontribusi lebih besar terhadap total produksi.

Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi volume produksi di PPS Bungus sebesar 3,84%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang positif dalam hal produksi. Selain itu, dari sisi target yang ditetapkan, terlihat bahwa target volume produksi untuk tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar ±10% dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Peningkatan target ini



Gambar 9. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tidak terlepas dari sinergi yang efektif antara Kelompok Kerja Kesyahbandaran dan Kelompok Kerja Operasional. Kolaborasi ini menciptakan alur kerja yang efisien dan terintegrasi, memungkinkan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing pihak secara optimal. Peran ini didukung oleh koordinasi yang solid, sehingga setiap hambatan operasional dapat segera diatasi.

Di samping itu, kontribusi petugas pendataan ikan juga memegang peranan penting. Dengan pemantauan lapangan dan dermaga secara konsisten, mereka tidak hanya memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat, tetapi juga mencatat data hasil tangkapan dan nilai produksi dengan cermat. Ketelitian ini menjadi elemen kunci dalam mendukung validitas data dan perencanaan strategis untuk mencapai target volume produksi.

Peningkatan aktivitas kapal penangkapan ikan di wilayah PPS Bungus turut memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) volume produksi. Tingginya jumlah trip penangkapan ikan, terutama pada Triwulan III, dengan puncaknya di bulan Agustus, menunjukkan intensitas operasional yang signifikan. Aktivitas yang intensif ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian volume produksi yang bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan realisasi volume produksi di PPS Bungus pada tahun 2024, beberapa tantangan eksternal perlu diantisipasi. Salah satu hambatan utama adalah kondisi cuaca yang tidak menentu, yang sering kali mengganggu operasional kapal penangkap ikan. Selain itu, fase terang bulan juga memengaruhi perilaku ikan, sehingga mengurangi efektivitas penangkapan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi adaptasi yang terencana dan fleksibel. Misalnya, penyusunan jadwal operasional yang mempertimbangkan prediksi cuaca dan fase bulan, serta penggunaan teknologi penangkapan yang lebih efisien. Dengan pendekatan yang tepat, dampak dari faktor eksternal dapat diminimalkan, sehingga target produksi tetap tercapai secara optimal tanpa mengorbankan aspek keberlanjutan sumber daya perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator volume produksi pada tahun 2024 adalah :

- a) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- b) Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan Untuk menunjang PNBK Pasca Produksi;
- c) Peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan perikanan;
- d) Koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan perikanan tangkap;
- e) Sosialisasi dan penerapan kebijakan keberlanjutan sumber daya perikanan;
- f) Penguatan program pemberdayaan nelayan dan kelompok usaha perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumberdaya pendukung meliputi 2 (dua) hal, yaitu sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia.

Anggaran

Tabel 10. Analisa Efisiensi IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus	130,14%	149.640.000	110.614.153	194.741.496	84.127.343
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				56,22%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{56,22\%}{20} \times 50 \right)$				190,55%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 73,92% dari total alokasi sebesar Rp. 149.640.000,-. Tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung operasional serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi perikanan tangkap di PPS Bungus. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar 56,22%, menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Bahkan, nilai efisiensi yang mencapai 190,55% menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak hanya sesuai dengan perencanaan, tetapi juga mampu menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Capaian ini membuktikan bahwa alokasi dana yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan volume produksi perikanan tangkap di PPS Bungus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari petugas pendataan produksi, pengelola data perikanan, dan verifikator data produksi. Seluruh SDM ini tergabung dalam tim kerja operasional pelabuhan, sehingga memungkinkan koordinasi yang lebih efektif serta sinkronisasi data produksi yang lebih akurat. Dengan adanya sinergi antarpetugas, proses pencatatan, pengelolaan, dan verifikasi data dapat berjalan dengan lancar, mendukung penyajian informasi produksi yang valid dan terpercaya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akurasi pelaporan serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan perikanan tangkap di PPS Bungus.

Sasaran Kinerja (SK) 3: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing

Sasaran kinerja keenam (SK-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 3 – Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.

Target dan Realisasi

Indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi merupakan perhitungan dari usulan pengusahaan baik baru ataupun perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dibandingkan dengan total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di PPS Bungus. Realisasi indikator ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11 Capaian Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

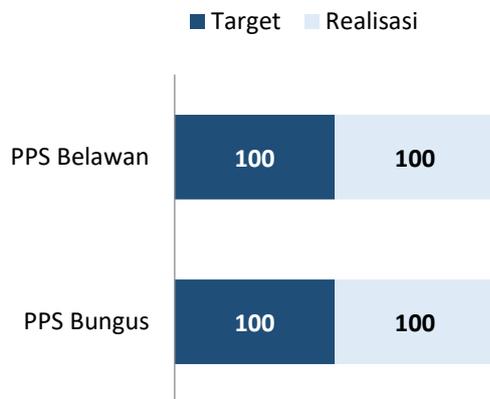
SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing							
IK 3		Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	100	100	100	100	100	-	-

Realisasi capaian indikator persentase permohonan pengusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 18 permohonan pengusahaan, baik berupa permohonan baru maupun perpanjangan izin, yang diajukan di PPS Bungus.

Capaian 100% ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan yang masuk telah diproses secara menyeluruh, mulai dari tahap verifikasi berkas administrasi, analisis kelayakan teknis dan ekonomi, hingga evaluasi akhir sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen PPS Bungus dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan kepada para pelaku usaha perikanan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi bukti dari efektivitas koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti tim evaluasi teknis, petugas administrasi, dan pemangku kebijakan di PPS Bungus. Proses yang terstruktur dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi

dalam pengelolaan permohonan, seperti sistem elektronik untuk memantau status permohonan, turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.



Gambar 10. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian tahun 2024 di PPS Bungus tetap konsisten, yaitu mencapai 100%. Konsistensi ini menunjukkan bahwa PPS Bungus mampu mempertahankan kinerja optimal dalam memproses, menganalisis, dan mengevaluasi seluruh permohonan perusahaan, baik yang baru maupun perpanjangan.

Apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya, capaian realisasi PPS Bungus pada tahun 2024 setara dengan PPS Belawan, yang juga berhasil mencapai tingkat realisasi

100%. Artinya, seluruh permohonan perusahaan yang diajukan di PPS Belawan pada tahun 2024 telah dianalisis dan/atau dievaluasi secara menyeluruh. Kesamaan ini mencerminkan komitmen bersama antarunit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha perikanan di wilayah masing-masing.

Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target, tetapi juga mengindikasikan standar operasional yang merata dan penerapan prosedur evaluasi yang efektif di seluruh unit kerja.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di PPS Bungus didukung oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingginya peluang investasi di kawasan PPS Bungus, yang didukung dengan ketersediaan lahan strategis untuk pengolahan dan pengembangan usaha. Kondisi ini memberikan potensi signifikan untuk menarik minat para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan perusahaan. Selain itu, keberhasilan ini juga diperkuat dengan keseriusan tim pelayanan usaha dalam mengoptimalkan sistem pelayanan dan pengelolaan. Namun, terdapat hambatan yang perlu diperhatikan, yaitu masih adanya lahan dan bangunan di kawasan pelabuhan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tantangan ini berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja di masa mendatang jika tidak segera ditangani. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pelayanan usaha secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik melalui media informasi maupun kegiatan langsung seperti survei indeks kepuasan konsumen. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan animo stakeholder, menyampaikan informasi terkini, serta menerima masukan berupa saran atau keluhan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja juga tidak lepas dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang mencakup aspek tata kelola yang baik serta operasional perusahaan yang efektif. Tata kelola yang baik diwujudkan melalui penerapan prosedur yang jelas, terstruktur, dan efisien untuk memastikan setiap permohonan perusahaan dianalisis dan dievaluasi

secara tepat waktu dan akurat. Dalam pelaksanaannya, PPS Bungus mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang detail, memberikan pelatihan berkala kepada staf untuk meningkatkan kompetensi mereka, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengelolaan. Penggunaan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pelacakan status permohonan secara real-time, mengurangi risiko kesalahan administratif, serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan data.

Di sisi lain, operasional perusahaan yang efektif memastikan kelancaran seluruh proses di pelabuhan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan evaluasi, koordinasi yang harmonis antarunit kerja, dan evaluasi berkala terhadap kinerja operasional. Penilaian rutin ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang muncul, sehingga langkah korektif dapat segera diambil. Dengan pendekatan ini, PPS Bungus berhasil menciptakan sinergi antara tata kelola dan operasional, yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan permohonan perusahaan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 12 Analisa Efisiensi Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	100%	1.072.873.000	860.368.571	1.072.873.000	212.504.429
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				19,81%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{19,81\%}{20} \times 50\right)$				99,53%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase permohonan perusahaan yang dianalisis dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 80,19% dari total alokasi anggaran tahun 2024. Tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung proses analisis dan evaluasi permohonan perusahaan di sektor perikanan. Berdasarkan hasil analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 19,81%, dengan nilai efisiensi mencapai 99,53%. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan dengan optimal, menghasilkan kinerja yang efisien dalam mendukung kelancaran pengelolaan dan evaluasi permohonan perusahaan di PPS Bungus.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator ini didukung dengan komitmen dan sinergi tim pelayanan usaha yang di support satu orang ketua tim kerja dengan tiga orang pegawai terdiri dari: satu orang penelaah pengembangan usaha, satu orang AP3T dan satu orang P3T yang bertanggungjawab terhadap urusan perusahaan di pelabuhan.

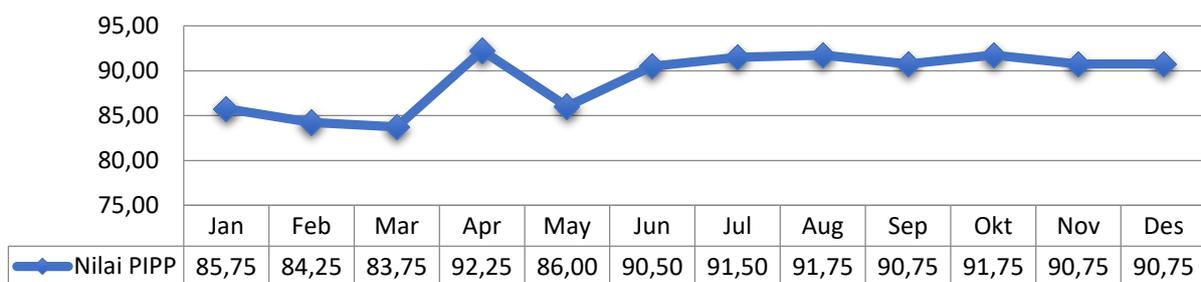
Indikator Kinerja (IK) 4 – Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

IKU ini juga merupakan nilai atas capaian tingkat operasional laporan yang mendukung kegiatan-kegiatan operasional UPT PPS Bungus berupa pengumpulan data, informasi, publikasi, dan kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan yang di nilai setiap bulan dari eselon I DJPT (EVKIN) yang meliputi 27 jenis kriteria yaitu: Frekuensi Pengiriman Data (PIPP), ELogbook, Aplikasi SPB-online, SHTI, Realisasi Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pelabuhan, Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan, Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan, Panjang Dermaga, Kedalaman Kolam, Sarana Perbaikan (Docking, bengkel), Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan, Ketersediaan Lahan Pelabuhan, Pelayanan Tambat Labuh, Produksi Perikanan, Frekuensi Kunjungan Kapal, STBLKK, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis, Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi, Pelaksanaan K5, Penyaluran Air Bersih (kapal dan industri pengolahan), Penyaluran Es (kapal), Penyaluran BBM (kapal), Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP, Pemanfaatan Lahan Pelabuhan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan.

Target dan Realisasi

Nilai PIPP



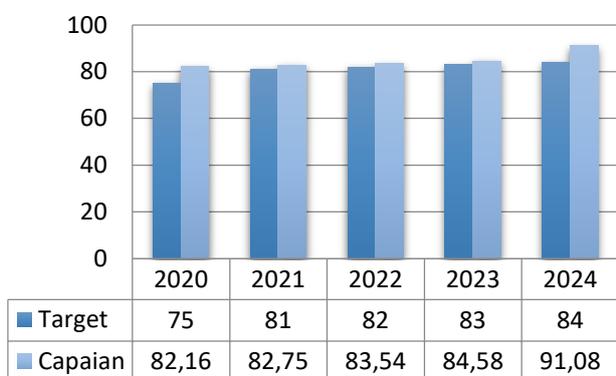
Gambar 11 Capaian Tingkat Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan data capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, analisis per triwulan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan. Pada triwulan pertama (Januari–Maret), capaian kinerja mengalami sedikit penurunan dari 85,75 di Januari menjadi 83,75 di Maret. Namun, memasuki triwulan kedua (April–Juni), terjadi lonjakan pada April dengan capaian tertinggi dalam tahun tersebut, yaitu 92,25, sebelum kembali menurun ke angka 86,00 di Mei dan meningkat lagi menjadi 90,50 di Juni. Pada triwulan ketiga (Juli–September), capaian kinerja relatif stabil dengan angka berkisar antara 90,75 hingga 91,75, menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target. Perhatian utama dalam analisis ini tertuju pada triwulan keempat (Oktober–Desember), di mana capaian kinerja menunjukkan kestabilan yang tinggi. Pada Oktober, capaian mencapai 91,75, kemudian sedikit menurun menjadi 90,75 di November dan Desember. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan puncak capaian di April, triwulan keempat tetap menunjukkan performa yang kuat

dan stabil di atas angka 90. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan operasional di PPS Bungus tetap berjalan optimal menjelang akhir tahun, dengan tingkat pencapaian yang konsisten dan efisien.

Tabel 13. Capaian Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

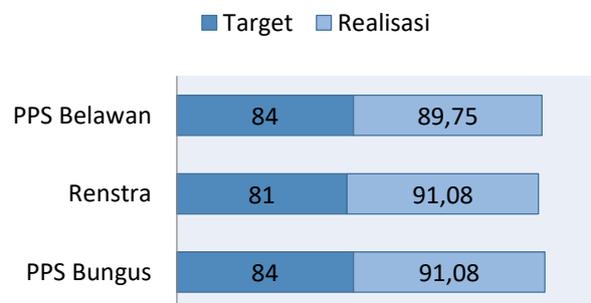
SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing									
IK 4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
82,16	82,75	83,54	84,58	91,08	84	91,08	108,43	81	91,08



Gambar 12. Capaian PPS Bungus tahun 2020-2024

83, yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi operasional di PPS Bungus dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Kemudian dapat dilihat juga bahwa capaian tingkat kinerja PPS Bungus pada tahun 2024 tidak hanya melampaui target tahunan, tetapi juga telah melebihi target akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, dengan pencapaian 108,43%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan pelabuhan perikanan serta efektivitas program yang diterapkan. Jika dibandingkan dengan satuan kerja (satker) lainnya, PPS Bungus juga menunjukkan performa yang lebih unggul, dengan selisih capaian sebesar 1,58% lebih tinggi dibandingkan PPS Belawan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa PPS Bungus terus mengalami peningkatan dalam kinerja operasional dan pengelolaan sumber daya, sehingga mampu mencapai serta melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dalam periode 2020–2024. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase pencapaian tahun 2024 lebih tinggi, yakni mencapai 108,43% dari target yang ditetapkan sebesar 84. Sementara itu, capaian tahun 2023 sebesar 101,90% dari target sebesar



Gambar 13. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh kedisiplinan tim dalam melakukan penginputan data setiap bulannya, serta adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Pembagian tugas penginputan dan monitoring oleh setiap petugas dalam tim kerja OPK, TKPU, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial yang juga turut berkontribusi dalam pencapaian ini.

Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang harus diatasi, yaitu frekuensi pengiriman data di aplikasi PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan) yang masih belum maksimal. Upaya peningkatan diperlukan untuk mencapai nilai optimal. Walaupun terdapat kendala ini, sinergitas dalam penginputan data telah dilaksanakan dengan baik, sehingga realisasi indikator tetap dapat dicapai meski belum mencapai nilai maksimal.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dalam hal pengelolaan dan operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP).

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 14. Analisa Efisiensi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	108,43%	59.198.000	53.121.835	64.188.391	11.066.556
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				18,69%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{18,69\%}{20} \times 50\right)$				96,73%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 mencapai 89,74% dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 59.198.000,-. Tingginya tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung berbagai aspek operasional dan pengelolaan pelabuhan. Berdasarkan analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 18,69%, dengan nilai efisiensi mencapai 96,73%. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal, dengan pengeluaran yang tetap terkendali namun tetap mampu mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan ini menegaskan bahwa PPS Bungus tidak hanya berhasil merealisasikan anggaran dengan baik, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja pelabuhan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IKU Tingkat Operasional pelabuhan didukung oleh tim penginput PIPP yang bertugas untuk melakukan input data pada masing-masing kriteria yang dinilai pada aplikasi PIPP, setiap kriteria pada aplikasi PIPP memiliki penanggungjawab yang bisa berasal dari kelompok kerja yang berbeda, disesuaikan dengan kriteria tersebut.

Indikator Kinerja (IK) 5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

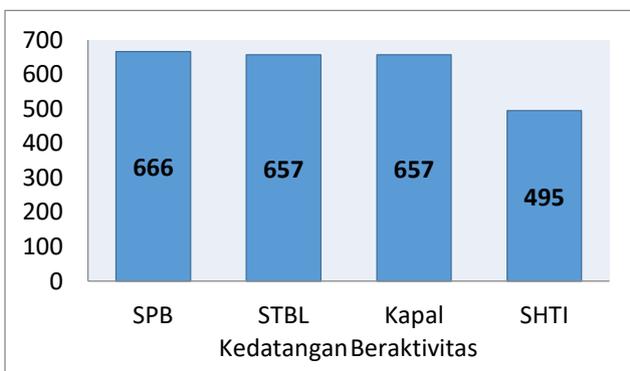
Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (SPB), yaitu jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan, yaitu jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan.
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan, yaitu jumlah permintaan verifikasi SHTI dibagi dengan jumlah SHTI yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

Tabel 15 Capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

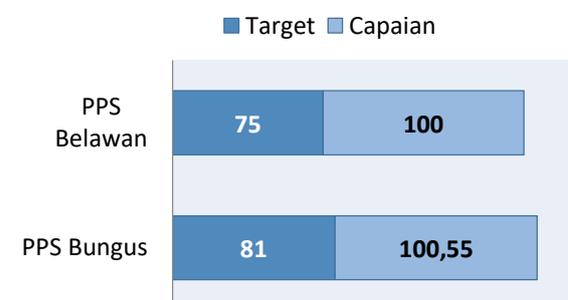
SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing							
IK 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	93,75	100,55	81	100,55	124,14	-	-



Gambar 15. Pelayanan Kesyahbandaran Tahun 2024

kesyahbandaran. Dibandingkan dengan satuan kerja (satker) lainnya, yakni PPS Belawan, capaian PPS Bungus lebih tinggi sebesar 0,55%. Namun, secara persentase capaian, PPS Belawan justru mencatatkan hasil yang lebih tinggi dengan selisih 9,19% dibandingkan PPS Bungus pada tahun 2024. Tingginya selisih capaian tersebut disebabkan oleh perbedaan target antara kedua pelabuhan, di mana target PPS Belawan lebih kecil dibandingkan dengan target PPS Bungus untuk tahun 2024. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi capaian tersebut adalah kelengkapan dokumen kapal yang beroperasi di PPS Belawan. Di PPS Belawan, kelengkapan dokumen kapal yang beraktivitas sangat mendukung kelancaran pelayanan kesyahbandaran, sehingga seluruh kapal yang beroperasi dapat diterbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB)-nya

Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus tahun 2024 mencapai 100,55%, dengan persentase capaian sebesar 124,14% dari target yang ditetapkan sebesar 81. Capaian ini menunjukkan bahwa PPS Bungus berhasil melampaui target yang telah ditentukan, mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pelayanan



Gambar 14. Perbandingan dengan Satker Lain

tanpa kendala. Meskipun capaian PPS Bungus tidak setinggi PPS Belawan secara persentase, kinerja PPS Bungus tetap mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kesyahbandaran, terutama dengan melebihi target yang telah ditetapkan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di dukung dengan kinerja tim kesyahbandaran dalam menghimbau para pemilik ataupun pengurus kapal perikanan yang akan melakukan docking di kolam pelabuhan untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan dengan lengkap. Realisasi ini juga didukung dengan adanya kesadaran pemilik kapal dalam mengajukan permohonan SPB, STBLK kedatangan kapal dan SHTI yang semakin meningkat.

Sementara dalam upaya pencapaian realisasi indikator ini, yang menjadi penghambat keberhasilan adalah masih ada kapal-kapal di kolam pelabuhan yang akan Docking namun belum memiliki dokumen yang lengkap.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di pelabuhan tersebut. Tata kelola yang baik melibatkan penerapan prosedur dan kebijakan yang jelas serta transparan, yang memastikan setiap aspek pelayanan kesyahbandaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, operasional kesyahbandaran yang efektif mencakup pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pemeliharaan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi dan operasional. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pihak pelabuhan, pengguna jasa, dan otoritas maritim, juga memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran operasional kesyahbandaran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 16. Analisa Efisiensi Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	124,14%	24.710.000	21.681.951	30.674.994	8.993.043
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				36,39%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{36,39\%}{20} \times 50 \right)$				140,98%	

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2024 mencapai 87,75% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 24.710.000,-. Capaian penyerapan anggaran ini mencerminkan penggunaan anggaran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesyahbandaran. Berdasarkan analisis efisiensi, diperoleh efisiensi sebesar 36,39%, dengan nilai efisiensi mencapai 140,98%. Nilai efisiensi yang tinggi ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya berhasil digunakan untuk mencapai target, tetapi juga menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dibelanjakan. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesyahbandaran di PPS Bungus, sehingga mendukung pencapaian kinerja yang optimal pada tahun 2024.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal dan terlatih. Tim kerja Kesyahbandaran di PPS Bungus terdiri dari 11 personil yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kesyahbandaran dengan optimal. Keberadaan tim ini memastikan bahwa proses pelayanan, seperti penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) dan berbagai prosedur kesyahbandaran lainnya, dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan adanya SDM yang kompeten dan berdedikasi, PPS Bungus mampu mencapai tingkat pelayanan yang baik, yang tercermin dalam capaian kinerja yang tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja (SK) 4: Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal

Sasaran kinerja kelima (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah kawasan yang mencakup daratan dan perairan di sekitarnya, dengan batas-batas tertentu, yang digunakan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan. Di dalam pelabuhan perikanan, kapal perikanan dapat bersandar, berlabuh, dan/atau melakukan bongkar muat ikan, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Untuk mendukung fungsi tersebut, setiap pelabuhan perikanan harus memiliki fasilitas yang terbagi dalam tiga kategori: fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Dalam rangka menunjang operasi pelabuhan perikanan, pengembangan fasilitas menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dihitung dengan membandingkan jumlah pengembangan fasilitas yang telah dilaksanakan dengan masterplan atau draft

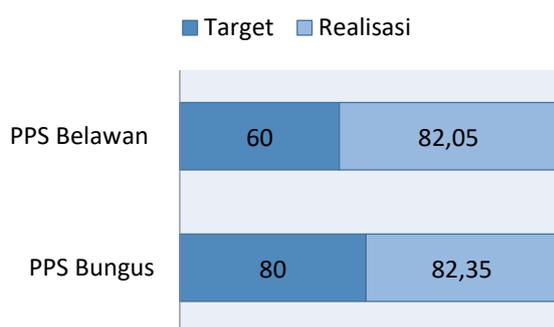
perubahan masterplan PPS Bungus. Dengan cara ini, dapat diketahui sejauh mana pengembangan fasilitas di PPS Bungus telah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan memastikan pelabuhan ini dapat terus beroperasi dengan optimal untuk mendukung kegiatan perikanan.

Target dan Realisasi

Tabel 17 Capaian Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal									
IK 6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	80	100	57	100	175,44	-	-

Realisasi Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 175,44%, melebihi target yang ditetapkan. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah fasilitas yang telah dimanfaatkan di PPS Bungus hingga tahun 2024, dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang tercantum dalam reviu masterplan PPS Bungus tahun 2022. Beberapa fasilitas yang belum termanfaatkan sesuai dengan Masterplan 2022 antara lain pelayanan perbaikan perawatan kapal, sport and health education, SPBB non-subsidi, kantor karantina, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan bangunan edukasi bahari. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan, yakni lebih tinggi 72,5% dari capaian tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan fasilitas di PPS Bungus untuk mendukung operasional pelabuhan perikanan yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 16. Perbandingan dengan Satker Lain

Dalam perbandingan dengan satuan kerja (satker) lain, seperti PPS Belawan, realisasi pengendalian pengembangan fasilitas di kedua pelabuhan tersebut sama-sama mencapai 100%. Namun, jika dilihat dari persentase capaian, PPS Bungus memiliki capaian yang lebih tinggi sebesar 8,77%. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan target yang ditetapkan, di mana target PPS Belawan lebih tinggi dibandingkan dengan PPS Bungus.

Meskipun demikian, capaian PPS Bungus yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada, serta komitmen dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan pengembangan fasilitas yang sesuai dengan masterplan yang telah direview pada tahun 2022. Namun, salah satu faktor

penghambat keberhasilan indikator ini adalah terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan yang diperlukan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur. Meskipun terdapat tantangan dalam pencapaian indikator ini, PPS Bungus telah berupaya mengoptimalkan kegiatan pengembangan fasilitas dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator persentase pengendalian pengembangan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sangat bergantung pada berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu faktor utama yang berperan adalah pelaksanaan pengembangan, perbaikan, serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia mampu mendukung sistem Penangkapan Ikan Terukur secara optimal. Dengan adanya pengembangan yang tepat, fasilitas pelabuhan dapat memenuhi standar operasional yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kegiatan perikanan, serta memberikan manfaat langsung bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sebaliknya, jika program perbaikan dan rehabilitasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat menghambat operasional pelabuhan, menurunkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan, serta berdampak pada rendahnya pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program-program ini menjadi kunci dalam mencapai target pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan secara efektif dan berkelanjutan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	175,44%	592.884.000	443.286.462	1.040.155.689	596.869.227
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				100,67%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{100,67\%}{20} \times 50\right)$				301,68%	

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) 6 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 592.884.000. Hingga akhir tahun 2024, jumlah anggaran yang telah terserap mencapai Rp 443.286.462, atau setara dengan 74,77% dari total anggaran yang tersedia. Selain itu, efisiensi anggaran mencapai 100,67%, dengan nilai efisiensi sebesar 301,68%, yang mengindikasikan pemanfaatan dana secara optimal tanpa terjadi pemborosan. Efisiensi yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, sehingga mendukung pelaksanaan program pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan secara maksimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya dari tim kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Tim ini terdiri dari delapan orang pegawai yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan pengembangan fasilitas pelabuhan. Dengan adanya tim ini, berbagai kegiatan seperti pengembangan, perbaikan, dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 7 – Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

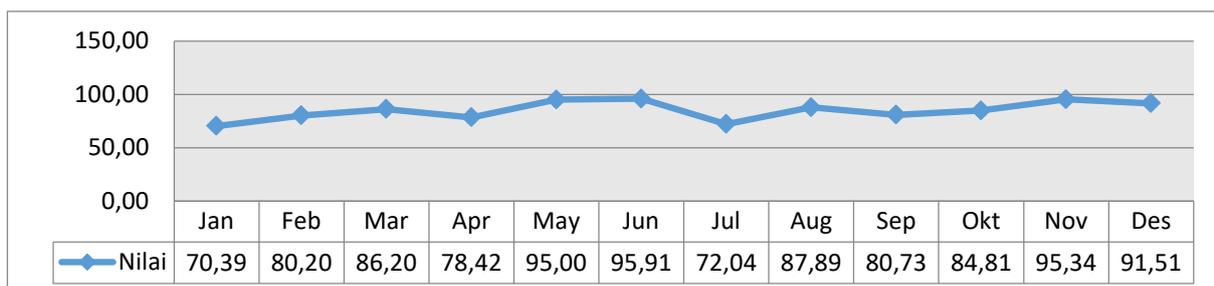
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Target dan Realisasi

Tabel 18 Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Optimal								
IK 7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	36,27	90,55	30,10	90,55	300,83	-	-



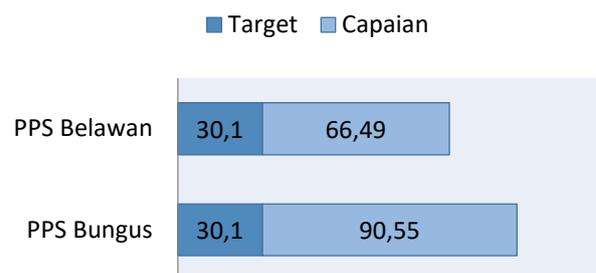
Gambar 17. Skor Penilaian aplikasi SELARASKAN tahun 2024



Gambar 18. Perbandingan Dengan Tahun 2023

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena sudah optimalnya penginputan indikator program mandatory maupun program voluntary pada aplikasi SELARASKAN sehingga nilai yang didapat lebih maksimal.

Capaian indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 berada dalam kategori **Sangat Baik**, dengan skor 90,55 dan persentase mencapai 300,83% dari total target. Dengan demikian, capaian sampai triwulan IV tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan, baik untuk triwulan maupun tahunan. Jika



Gambar 19. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkontribusi dalam penilaian. Salah satu faktor pendukung utama adalah terbentuknya tim penginputan yang bertanggung jawab untuk mengisi setiap evidence dalam aplikasi SELARASKAN.

Setiap anggota tim memiliki peran dalam memastikan kelengkapan data terkait program mandatory dan program evidence, serta menginput hasilnya ke dalam aplikasi SELARASKAN. Dengan adanya sistem ini, terjadi perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, sehingga nilai indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, pencapaian IK 7 masih menghadapi tantangan, terutama karena fluktuasi nilai yang dipengaruhi oleh kriteria dan data dukung dalam aplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut agar tim yang dibentuk dapat benar-benar mewakili dan mengelola setiap data dukung pada setiap kriteria yang digunakan dalam penilaian.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Pelaksanaan layanan dukungan Aplikasi SELARASKAN memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian IK 7 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Keberhasilan pencapaian didukung oleh evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan pemantauan secara real-time, sehingga tim dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Selain itu, adanya tim penginputan yang terorganisir dan mewakili masing-masing evidence mempermudah proses pengisian data secara akurat dan tepat waktu. Dengan sistem ini, akurasi data meningkat, dan evidence yang dibutuhkan dalam evaluasi lebih terdokumentasi dengan baik, sehingga target nilai dapat dicapai.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 19. Analisa Efisiensi Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	300,83%	202.459.000	202.392.063	609.057.409	406.665.346
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				200,86%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{200,86\%}{20} \times 50 \right)$				552,15%	

Upaya mendukung indikator kinerja nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 202.459.000 dan sampai akhir tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 202.392.063 atau 100% dengan efisiensi 200,86% dan nilai efisiensi 552,15%.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian IK 7 didukung oleh kontribusi SDM dari tim kerja sarana dan prasarana pelabuhan, yang berperan aktif dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja (SK) 5: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran kinerja kelima (SK-5) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

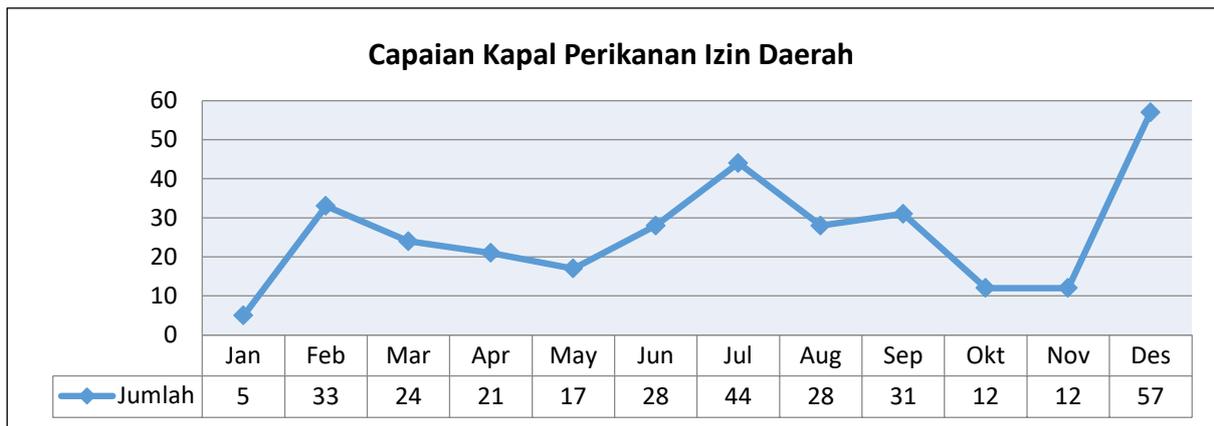
Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan, perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Indikator kinerja Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan merupakan jumlah dokumen kapal perikanan oleh PPS Bungus dengan formula perhitungan yaitu nilai posisi akhir jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan.

Target dan Realisasi

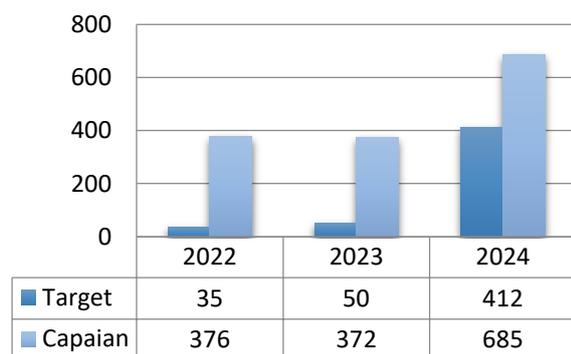
Tabel 20 Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SK 5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus								
IK 8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan								
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	376	372	685	412	685	166,26	-	-



Gambar 20. Capaian Kapal Perikanan Izin Daerah

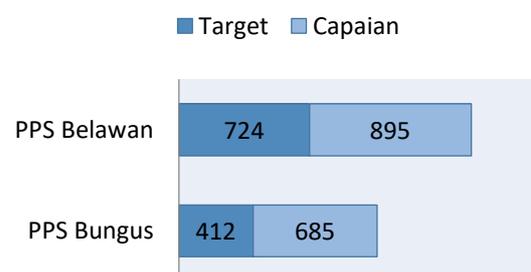
Hingga triwulan IV tahun 2024, capaian indikator kinerja utama kapal perikanan berizin daerah yang memenuhi ketentuan mencapai 685 unit, setara dengan 166,26% dari target tahun 2024. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus turut mendukung operasional kapal perikanan dengan menerbitkan SKKP untuk dua provinsi, yakni Sumatera Barat dan Bengkulu.



Gambar 21. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

juga mencatat angka tertinggi, yaitu 685, yang jauh melampaui capaian tahun 2022 sebesar 376 dan capaian tahun 2023 sebesar 372. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang lebih optimal, baik dari segi manajemen maupun implementasi program, untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, baik target maupun capaian pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan mencapai 412, meningkat secara drastis dibandingkan target tahun 2022 yang hanya sebesar 35 dan tahun 2023 sebesar 50. Capaian pada tahun 2024



Gambar 22. Perbandingan dengan Satker Lain

Jika dibandingkan dengan Satuan Kerja lain, yaitu PPS Belawan, dari segi jumlah capaian, PPS Bungus menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan PPS Belawan. Namun, jika dilihat dari persentase capaian terhadap target, PPS Bungus lebih unggul dengan persentase capaian sebesar 166,26%, sementara PPS Belawan hanya mencapai 123,62%. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan target yang ditetapkan antara PPS Bungus dan PPS Belawan. Meskipun jumlah capaian PPS Bungus lebih rendah, tingkat keberhasilan dalam memenuhi targetnya menunjukkan performa yang lebih efektif dan efisien dibandingkan PPS Belawan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 8 mencakup: 1) tingginya antusiasme pemilik kapal perikanan dalam melaporkan pengajuan pemeriksaan kapal, yang berperan signifikan dalam memastikan realisasi indikator ini; dan 2) dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penerbitan SKKP, yang memungkinkan pelaksanaan pengecekan dan pemeriksaan kapal perikanan dilakukan secara optimal. Namun, pada tahun 2024, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu tidak adanya petugas pengecekan di Area Bengkulu karena sedang menjalani tugas belajar. Situasi ini menyebabkan proses pengecekan kapal dan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Bengkulu mengalami sedikit hambatan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, yaitu adanya pelaksanaan implementasi kebijakan bidang kapal perikanan. Implementasi tersebut berupa pemeriksaan kelaikan, pengukuran, pengujian, dan inspeksi kapal perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan yang akan diterbitkan dokumennya memenuhi standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 21. Analisa Efisiensi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	166,26%	18.750.000	18.745.820	31.173.750	12.427.930
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				66,28%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{66,28\%}{20} \times 50\right)$				215,70%	

Pencapaian indikator kinerja kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.750.000 dan jumlah penyerapan sampai akhir 2024 mencapai Rp 18.745.820 atau 99,97% dengan efisiensi 66,28% dan nilai efisiensi 215,70%.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian IKU ini, ditetapkan petugas Kelaikan Kapal sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai yang telah menerima Diklat petugas kelaikan kapal Perikanan. Sembilan petugas tersebut berasal dari jabatan dan tupoksi yang berbeda-beda sehingga adanya rangkap tugas.

Sasaran Kinerja (SK) 6: Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja keenam (SK-6) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 9 – Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan, kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut yaitu melalui pengendalian usaha subsektor penangkapan ikan dan usaha subsektor pengangkutan ikan, khususnya tata kelola Kapal Perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan Kapal Perikanan agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya ikan. Kapal Perikanan sebagai sarana produksi memiliki dua elemen, yakni elemen fisik dan elemen personel.

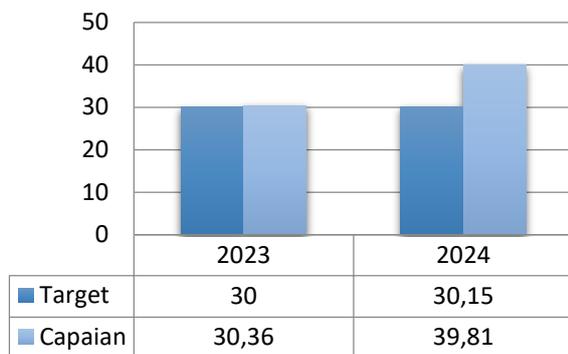
Kegiatan pemenuhan kompetensi kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan bagi awak kapal perikanan, selain dilaksanakan melalui diklat, dapat juga dilaksanakan melalui bimbingan teknis dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Pasal 146 sampai dengan pasal 149. Pada tahun 2024 pelaksanaan IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Metode penghitungan IK 9 dengan membandingkan jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-Pkl/PKL dan sudah tersertifikasi dibagi jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL.

Target dan Realisasi

Tabel 22 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SK 6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
	2020	2021	2022	2023	2024	Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
Target						Realisasi	%	Target	Realisasi	
IK 9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan									
	-	-	-	30,36	39,81	30,15	39,81	132,04	-	-

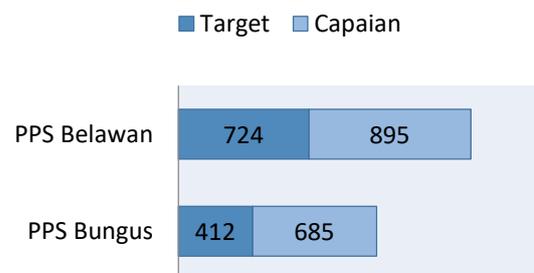
Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja terkait persentase peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus mencapai 39,81%, atau sebesar 132,04% dari target yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi, PPS Bungus telah menerbitkan 103 Pas Kecil Laut (PKL) bagi awak kapal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 awak kapal telah tersertifikasi, yang terdiri dari 16 nahkoda, 16 kepala kamar mesin (KKM), dan 9 anak buah kapal (ABK).



Gambar 23. Perbandingan Dengan Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, capaian PPS Bungus masih lebih rendah dengan selisih sebesar 5,76%. PPS Belawan mencatat capaian sebesar 45,57%, yang lebih tinggi dibandingkan PPS Bungus. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah nelayan yang telah memperoleh Pas Kecil Laut (PKL) dan sertifikasi di PPS Belawan yang lebih besar. Tingginya angka sertifikasi di PPS Belawan mencerminkan cakupan program pembinaan yang lebih luas serta potensi jumlah awak kapal yang lebih banyak dibandingkan dengan PPS Bungus. Meskipun demikian, capaian PPS Bungus tetap menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas program peningkatan kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan di wilayahnya.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kinerja tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan selisih persentase sebesar 9,45%. Hal ini mencerminkan efektivitas program pembinaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, khususnya bagi para awak kapal yang beroperasi di PPS Bungus.



Gambar 24. Perbandingan dengan Satker Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh dua faktor utama. Pertama, meningkatnya kesadaran awak dan pemilik kapal perikanan tentang pentingnya kompetensi, asuransi jiwa, dan pelaksanaan Pas Kecil Laut (PKL), yang mendorong partisipasi dalam program sertifikasi dan perlindungan. Kedua, sosialisasi dan pendekatan langsung yang terus dilakukan turut memperkuat pemahaman serta keterlibatan mereka. Dengan faktor-faktor ini, diharapkan pencapaian indikator kinerja terus meningkat seiring optimalisasi program pembinaan dan perlindungan awak kapal perikanan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan fasilitas dan program pembinaan peningkatan kompetensi. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan teknis bagi awak kapal, sosialisasi terkait keselamatan kerja dan perlindungan asuransi, serta pemberian sertifikasi bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Fasilitas yang memadai, termasuk akses terhadap pelatihan dan kemudahan dalam proses perizinan serta sertifikasi, berperan penting dalam meningkatkan capaian indikator kinerja. Sebaliknya, jika fasilitas dan program pembinaan tidak berjalan optimal—baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi nelayan, atau kendala administratif—maka pencapaian indikator dapat terhambat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas program pembinaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi serta perlindungan bagi nelayan dan awak kapal perikanan.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 23. Analisa Efisiensi Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	132,04%	8.700.000	8.630.300	11.487.480	2.857.180
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				32,84%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{32,84\%}{20} \times 50 \right)$				132,1%	

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 8.700.000, dengan realisasi penyerapan hingga akhir tahun 2024 mencapai Rp 8.630.300 atau sebesar 99,20% dari total anggaran yang tersedia. Tingginya tingkat penyerapan ini mencerminkan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai program peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan perlindungan nelayan serta awak kapal perikanan. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga menunjukkan hasil yang optimal, dengan tingkat efisiensi sebesar 32,84% dan nilai efisiensi mencapai 132,1%. Hal ini menandakan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi serta perlindungan awak kapal, sekaligus menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Sumber Daya Manusia

Upaya pencapaian indikator kinerja ini dilaksanakan oleh tim kerja kesyahbandaran pelabuhan yang berjumlah 11 orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Syahbandar Pelabuhan Perikanan, 3 (tiga) pengelola syahbandar, 1 (satu) analis kesyahbandaran, 3 (tiga) orang P3T Pertama, dan 1 (satu) orang AP3T.

Sasaran Kinerja (SK) 7: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kinerja ketujuh (SK-7) yang akan dicapai adalah “Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan pelabuhan perikanan samudera bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

Indikator Kinerja (IK) 10 – Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis, predikat ini merupakan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK harus memenuhi sebagian besar kriteria tersebut, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target dan Realisasi

Tabel 24 Capaian Indikator Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 10		Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
66,75	64,94	56,92	80,74	76,56	75	76,56	102,08	85	76,56

No.	Komponen	Bobot	Kriteria Bobot WBK	Nilai Perolehan	% Capaian
A.	Pengungkit (Pemenuhan & Reform)	60			
1	Manajemen Perubahan	8	4,8	2,76	34,49%
2	Penataan Tatalaksana	7	4,2	3,72	53,19%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10	6	8,52	85,23%
4	Penguatan Akuntabilitas	10	6	7,9	79,05%
5	Penguatan Pengawasan	15	9	11,69	77,93%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	6	7,15	71,57%
Total Pengungkit				40,56	67,61%
B.	Hasil	40			
I.	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	22,5	≥ 18,25	22,20	89,78%
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	17,5	≥ 15,75	16,45	94,00%
2	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	≥ 2,50	3,75	75,00%
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,5		15,79	90,25%
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,5	≥ 14,00	15,79	90,25%
Total Hasil				35,99	89,98%
Total Nilai		100		76,56%	

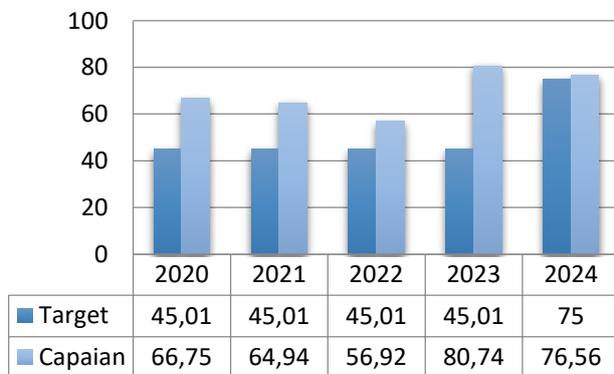
TERBILANG: TUJUH PULUH ENAM KOMA LIMA ENAM

Tabel 25. Hasil Penilaian LKE WBK PPS Bungus

asistensi bersama dengan Tim Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang melakukan pendampingan serta evaluasi secara mendalam. Penilaian Zona Integritas ini mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yang terdiri dari dua komponen

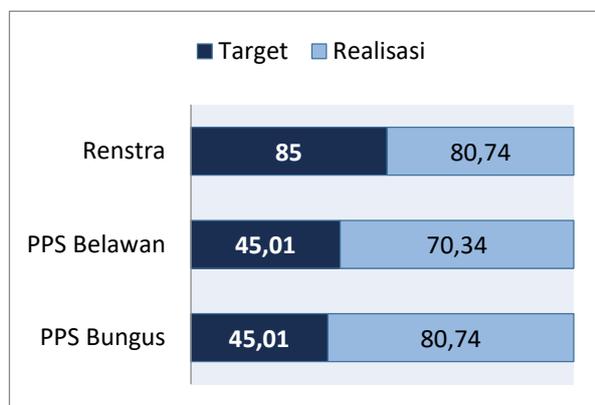
Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus pada tahun 2024 mencapai 76,56, atau setara dengan 102,08% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam melampaui target yang telah direncanakan, mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Nilai tersebut diperoleh melalui proses

utama, yaitu komponen Pengungkit (60%) dan komponen Hasil (40%). Komponen Pengungkit mencakup berbagai aspek strategis seperti manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, serta pengawasan. Sementara itu, komponen Hasil menilai dampak nyata dari implementasi reformasi birokrasi, termasuk kepuasan masyarakat dan efektivitas layanan yang diberikan oleh PPS Bungus.



Gambar 25. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2023, PPS Bungus masih berada dalam tahap awal pembangunan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Oleh karena itu, target tahunan selama periode tersebut tetap ditetapkan pada angka 45,01. Target ini mencerminkan fokus PPS Bungus pada pembentukan dasar-dasar tata kelola yang baik, seperti penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas organisasi. Pada tahun 2024, PPS Bungus resmi dicanangkan sebagai unit kerja yang menjadi bagian dari program WBK. Dengan pencanangan tersebut, target tahunan mengalami peningkatan signifikan menjadi 75, sejalan dengan tingginya ekspektasi terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun ini, capaian berhasil mencapai 76,56, melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini didasarkan pada hasil evaluasi melalui proses asistensi dan pendampingan yang dilakukan bersama Inspektorat Jenderal V KKP, sehingga memberikan validasi yang lebih terukur dan komprehensif. Sebaliknya, capaian pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023) dihitung melalui mekanisme penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim Ortala DJPT. Penilaian tersebut berfokus pada pemenuhan indikator-indikator awal pembangunan Zona Integritas, yang mencakup berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, akuntabilitas, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas. Tren capaian yang melampaui target sejak tahun 2020 hingga 2023 mencerminkan komitmen berkelanjutan PPS Bungus dalam membangun Zona Integritas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.



Gambar 26. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, capaian PPS Bungus pada tahun 2024 baru mencapai 90,07% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mencapai target Renstra secara penuh. Sementara itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja (Satker) lain, seperti PPS Belawan, capaian PPS Bungus lebih rendah sebesar 68,52%.

berada pada tahap yang lebih lanjut, dengan target yang lebih tinggi, yaitu 75 pada tahun 2024.

Hal ini mencerminkan bahwa masing-masing Satker memiliki konteks dan fokus pengembangan yang berbeda sesuai dengan tahapan pembangunan Zona Integritas yang sedang dilaksanakan. PPS Bungus, yang sudah berada pada tahap pencahangan WBK, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam memenuhi target yang lebih ambisius dibandingkan dengan PPS Belawan, yang masih dalam tahap awal perencanaan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan dari kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- a. Terlaksananya Asistensi WBK: Proses asistensi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) telah berhasil dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui asistensi ini, diperoleh hasil penilaian mandiri yang dilakukan bersama tim asistensi. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aspek-aspek yang telah memenuhi standar serta area yang masih memerlukan perbaikan.
- b. Sinergitas dan Kolaborasi Antarbagian: Keberhasilan lainnya ditandai dengan adanya sinergitas yang kuat antara seluruh bagian dalam upaya pelaksanaan kegiatan. Seluruh dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses evaluasi dan penilaian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
- c. Efektivitas Tim dan Kepatuhan terhadap SOP: Tim yang terlibat dalam kegiatan ini telah bekerja secara efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi terhadap penyelesaian sebagian besar rekomendasi yang diberikan oleh tim asistensi dari Ortaga DJPT. Kepatuhan terhadap SOP juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria evaluasi yang ditentukan.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja, khususnya terkait dengan Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya inovasi yang dapat diterapkan di pelabuhan ini. Inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan zona integritas, baik dalam bentuk digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, maupun efisiensi operasional.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sangat dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu komponen utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah kegiatan persiapan penetapan zona integritas menuju WBK, yang mencakup pemenuhan dokumen pendukung WBK, penguatan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas, serta peningkatan sistem pengawasan internal yang transparan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan penetapan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam memperkuat implementasi tata kelola yang bersih dan akuntabel. PPS Bungus juga mengadakan berbagai kegiatan pendukung, seperti Forum

Konsultasi Publik, yang menjadi wadah interaksi antara PPS Bungus dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengakomodasi masukan untuk perbaikan sistem. Selain itu, dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Zona Integritas guna memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan keberlanjutan reformasi birokrasi. Keseluruhan program ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 26. Analisa Efisiensi Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan	102,08%	76.287.000	76.024.197	77.873.769	1.849.572
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				2,43%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{2,43\%}{20} \times 50\right)$				56,1%	

Pencapaian indikator kinerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 76.287.000. Hingga akhir tahun 2024, tingkat penyerapan anggaran telah mencapai Rp 76.287.000 atau sekitar 99,66%, menunjukkan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan program ini juga berhasil mencapai efisiensi sebesar 2,43%, dengan nilai efisiensi mencapai 56,1%. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada peningkatan integritas di lingkungan pelabuhan. Keberhasilan ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pelabuhan Perikanan, Kepala Pelabuhan mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pendukung yang terdiri dari 44 pegawai PPS Bungus, yang mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Pramubakti. Optimalisasi sumber daya manusia ini dilakukan secara efisien dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, di mana setiap pegawai tidak hanya menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tetapi juga melaksanakan tanggung jawab tambahan dalam pemenuhan dokumen WBK. Pendekatan ini memungkinkan percepatan proses administratif dan memastikan bahwa seluruh persyaratan dapat terpenuhi dengan baik tanpa

memerlukan tambahan tenaga kerja. Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam proses ini juga mendorong budaya kerja kolaboratif, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

Indikator Kinerja (IK) 11 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, reviu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Target dan Realisasi

Tabel 27 Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	92	88	80	88	110	-	-

Capaian indikator kinerja terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Persentase pemanfaatan rekomendasi mencapai 88%, atau setara dengan 110% dari target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas dalam menindaklanjuti temuan pengawasan untuk peningkatan kualitas layanan dan operasional pelabuhan. Secara keseluruhan, terdapat 25 rekomendasi yang diterbitkan selama tahun 2024, dengan rincian 22 rekomendasi telah diselesaikan secara tuntas, sementara 3 rekomendasi masih dalam status pending.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor penyebab keberhasilan Indikator Kinerja (IK) 11 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat dijelaskan dengan beberapa poin utama. Pertama, adanya tindak lanjut yang konsisten terhadap rekomendasi yang muncul dari laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Ini mencerminkan komitmen pelabuhan untuk merespons dan memperbaiki layanan berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna jasa. Kedua, pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi memberikan insentif positif yang mendorong peningkatan kinerja. Kriteria penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kinerja, kehadiran, kerjasama, inovasi/kreativitas, serta rekam jejak yang bebas dari keluhan personal, memberikan landasan yang jelas untuk memotivasi dan menghargai kontribusi positif pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian ini adalah dengan pembentukan tim-tim bersinergi dan adanya pemenuhan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan adalah kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 28. Analisa Efisiensi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	110%	74.823.000	74.788.267	82.305.300	7.517.033
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				10,05%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{10,05\%}{20} \times 50 \right)$				75,13%	

Dalam upaya mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dukungan anggaran memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya. Pada tahun 2024, alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 74.823.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp 74.788.267,- atau setara dengan 99,95% dari total yang direncanakan. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efisien, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan rekomendasi pengawasan juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 10,05%, dengan nilai efisiensi mencapai 75,13%. Capaian ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga dikelola secara efektif dan akuntabel, sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pelabuhan serta memperkuat transparansi dan tata kelola yang lebih baik.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP), Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai bagian, termasuk keuangan, Barang Milik Negara (BMN), tim Tata Kelola Sarana dan Prasarana, serta tim kerja Pelayanan Usaha. Seluruh tim bekerja secara sinergis untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti dengan optimal, sehingga mendukung peningkatan tata kelola dan kinerja pelabuhan secara menyeluruh.

Indikator Kinerja (IK) 12 – Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan turunan dari Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Rekonsiliasi kinerja adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola kinerja, menjadi sasaran bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja, serta sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sarana/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian rekonsiliasi kinerja, yakni aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (bobot 20%). Nilai rekonsiliasi kinerja PPS Bungus diukur dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di PPS bungus yang di hitung menggunakan kertas kerja rekonsiliasi yang sesuai ketentuan.

Target dan Realisasi

Tabel 29 Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

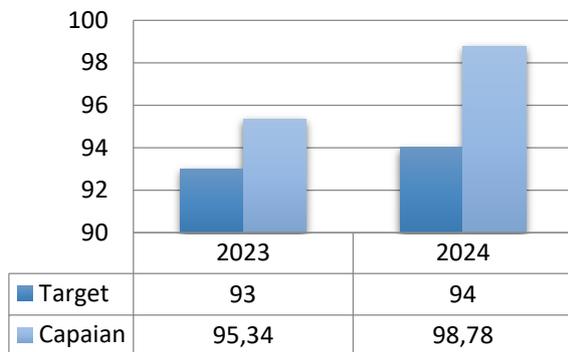
SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 12		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	95,34	98,78	94	98,78	105,09	-	-

Tabel 30. Aspek Penilaian Lembar Kerja Rekonsiliasi

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per Aspek	100	100	115,13	100
Skor dikali Bobot	25	25	28,78	20
Total Skor	98,78			

Capaian nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor sebesar 98,78 atau setara dengan 105,09% dari target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut diperoleh melalui proses pengisian lembar kerja rekonsiliasi kinerja tahun 2024 dalam kegiatan rekonsiliasi yang dilaksanakan bersama Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja yang berbasis data serta komitmen terhadap peningkatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pencapaian ini juga menjadi bukti sinergi yang baik antara berbagai unit kerja dalam memastikan setiap aspek operasional pelabuhan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan

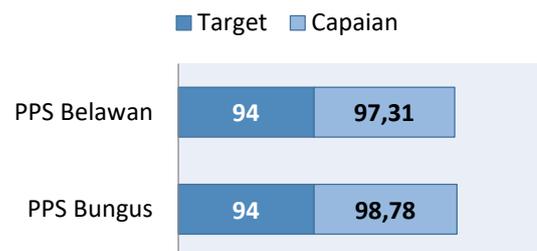
hasil yang melampaui target, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus diharapkan dapat terus memperkuat sistem manajemen kinerjanya, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.



Gambar 27. Perbandingan Tahun Sebelumnya

termasuk rekonsiliasi dan optimalisasi tata kelola, memberikan dampak positif terhadap pencapaian target yang lebih tinggi. Dengan tren peningkatan ini, diharapkan pelabuhan dapat terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan dan operasional di masa mendatang.

Apabila dibandingkan dengan capaian satuan kerja (satker) lainnya, kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan PPS Belawan. Selisih capaian antara kedua satker tersebut mencapai 1,57%, yang mengindikasikan bahwa PPS Bungus berhasil mencatat prestasi yang lebih baik dalam hal efisiensi atau produktivitas.



Gambar 28. Perbandingan dengan Satket Lain

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor keberhasilan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah 1) adanya sinergi antara tim pengelola AKIP dalam melakukan pelaporan kinerja dan pemantauan kinerja, sehingga tercapai aspek kepatuhan pelaporan, kesesuaian aspek antara data dan informasi yang dilaporkan, serta tercapainya target yang telah ditetapkan; 2) Adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan kinerja; dan 3) pelaporan AKIP yang dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja secara bersinergi dengan tim teknis pelabuhan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program atau kegiatan yang berperan dalam menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja (IK) 12 adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap implementasi program serta penggunaan anggaran. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala yang muncul, sehingga langkah perbaikan dapat segera diterapkan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi berperan dalam menilai efektivitas program serta efisiensi penggunaan sumber daya, sementara pelaporan yang transparan dan akuntabel memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan dapat menjadi bahan perbaikan di masa

mendatang. Dengan penerapan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang optimal, diharapkan pencapaian IK 12 dapat terus meningkat, mendukung tata kelola yang lebih baik, serta mengurangi risiko kegagalan dalam pelaksanaan program.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 31. Analisa Efisiensi Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	115,09%	20.762.000	20.760.701	23.894.985	3.134.284
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				15,1%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{15,1\%}{20} \times 50\right)$				87,75%	

Pencapaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 20.762.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 20.760.701 atau setara dengan 99,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingginya tingkat penyerapan ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, efisiensi pelaksanaan program juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 15,1% dengan nilai efisiensi mencapai 87,75%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Dengan hasil yang positif ini, diharapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat terus meningkatkan efektivitas program serta mempertahankan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung tercapainya indikator kinerja ini tergabung dalam Tim Pengelola Kinerja PPS Bungus, yang terdiri dari 10 orang anggota tim kerja. Selain itu, terdapat juga dukungan dari pegawai yang tergabung dalam Tim PM SAKIP Pelabuhan, yang berjumlah 6 orang. Para pegawai yang terlibat dalam kedua tim ini diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), sebagai bentuk optimalisasi sumber daya yang tersedia. Meskipun tugas yang dijalankan tidak sepenuhnya sesuai dengan tupoksi utama mereka, komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh anggota tim memungkinkan pencapaian kinerja yang optimal. Dengan adanya keterlibatan SDM yang berdedikasi, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan tata kelola pelabuhan secara keseluruhan.

Indikator Kinerja (IK) 13 – Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu:

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

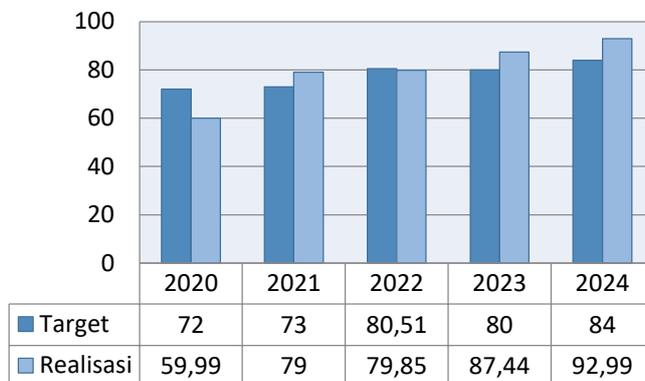
Target dan Realisasi

Tabel 32 Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
59,99	80,51	79,85	87,44	92,99	84	92,99	110,70	72	92,99

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor sebesar 92,99 atau setara dengan 110,70% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas dan kompetensi ASN dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, baik dalam aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, maupun kedisiplinan.

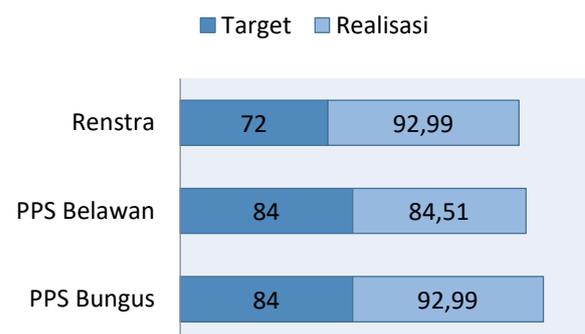
Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengembangan SDM, termasuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembinaan, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Dengan indeks profesionalitas yang terus meningkat, diharapkan ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan, tata kelola yang lebih baik, serta mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.



Gambar 29. Capaian PPS Bungus Tahun 2020 - 2024

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pada tahun 2020, capaian masih berada di bawah target, dengan skor 59,99 dari target 72. Namun, sejak tahun 2021, kinerja terus mengalami perbaikan dengan capaian yang secara konsisten melampaui target. Hal ini terlihat pada tahun 2021, di mana indeks mencapai 79 dari target 73, kemudian meningkat pada tahun 2022 dengan capaian 79,85 dari target 80,51, serta tahun 2023 dengan capaian 87,44 dari target 80.

Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN di PPS Bungus, baik melalui pengembangan kompetensi, pembinaan, maupun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif. Dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 92,99 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa strategi dan program yang diterapkan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk terus memperkuat profesionalisme aparatur dalam mendukung tata kelola pelabuhan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan yang optimal. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus telah mencapai 129,15% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi peningkatan profesionalitas ASN yang telah diterapkan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan satuan kerja (Satker) lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, capaian PPS Bungus juga menunjukkan hasil yang lebih unggul. Pada tahun 2023, capaian PPS Belawan berada pada angka 84,51 atau 100,61% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian PPS Bungus lebih tinggi dengan selisih sebesar 10,09%. Perbedaan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan profesionalitas ASN di PPS Bungus telah memberikan hasil yang lebih optimal. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan kapasitas SDM, implementasi kebijakan yang lebih efektif, serta pengelolaan kinerja yang semakin baik untuk mendukung tata kelola pelabuhan yang profesional dan berintegritas.



Gambar 30. Perbandingan Capaian

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah dengan: 1) memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop /Magang/Sejenis; 2) memberikan himbauan dari bagian kepegawaian terkait pengembangan kompetensi pegawai, khususnya himbauan bagi pegawai yang belum mencapai 20 JP; 3) partisipasi aktif dari seluruh pegawai untuk mengikuti diklat/seminar/pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah perencanaan, pengembangan dan pembinaan Disiplin Pegawai. Selain itu kegiatan monitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui seminar, diklat, maupun bimbingan teknis baik secara online maupun *offline*.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	110,70%	30.545.000	29.791.874	33.813.315	4.021.441
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				13,17%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{13,17\%}{20} \times 50\right)$				82,93%	

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.545.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 29.791.874 atau 97,57% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingkat penyerapan yang tinggi ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan program juga tercermin dari tingkat efisiensi sebesar 13,17%, dengan nilai efisiensi mencapai 82,93%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN. Dengan efisiensi yang baik dan capaian kinerja yang melampaui target, diharapkan PPS Bungus dapat terus meningkatkan efektivitas program pengembangan SDM, mempertahankan kinerja ASN yang profesional, serta memperkuat tata kelola pelabuhan yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas (IP) ASN, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus didukung oleh seluruh pegawai yang berjumlah 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap pegawai dihimbau untuk secara aktif mengikuti berbagai macam pelatihan yang sesuai dengan jenis jabatan masing-masing. Partisipasi dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, khususnya dalam memenuhi standar dimensi pendidikan dan pelatihan (diklat) minimal 20 Jam Pelajaran (JP). Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, pegawai diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan, efektivitas kerja, serta pencapaian kinerja yang lebih optimal di PPS Bungus.

Indikator Kinerja (IK) 14 – Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

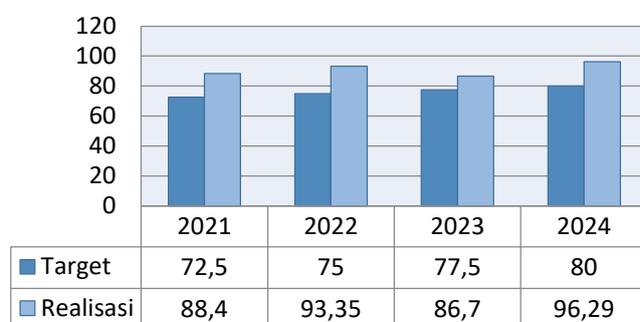
Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%).
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target dan Realisasi

Tabel 33 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 14		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	88,4	93,35	86,70	96,29	80	96,29	120,36	72,5	96,29



Gambar 31. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 96,29 atau 120,29% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh berdasarkan nilai capaian Eselon I (DJPT). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 8,42%. Selain itu, jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024, capaian PPS Bungus telah mencapai 132,81%, menunjukkan pencapaian yang signifikan melampaui target yang direncanakan. Namun, karena nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa pada

tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada nilai capaian DJPT, maka seluruh satuan kerja (Satker) memiliki capaian yang sama, sehingga perbandingan antar Satker tidak dapat dilakukan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa (PBJ) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, serta dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang lengkap dan sesuai standar yang ditentukan.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan ataupun kendala dalam pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah adanya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal yang menunjang operasional secara optimal. Selain itu, pada tahun 2024, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pengadaan juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian indikator, seperti keterlambatan proses pengadaan, kendala administratif, atau faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan menjadi kunci utama dalam memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 34. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	120,36%	482.302.000	481.712.920	580.498.687	98.785.767
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				20,48%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{20,48\%}{20} \times 50\right)$				101,2%	

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 482.302.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 481.712.920 atau 99,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingkat efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga menunjukkan hasil yang positif, dengan efisiensi sebesar 20,48% dan nilai efisiensi mencapai 101,2%. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal dalam mendukung pelaksanaan program pengadaan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan tepat guna.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh lima orang tim pengadaan, yang terdiri dari satu pejabat pengadaan dan empat orang panitia pengadaan yang mendapatkan penugasan tambahan dari atasan, karena bukan berasal dari jabatan pengelola PBJ.

Indikator Kinerja (IK) 15 – Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

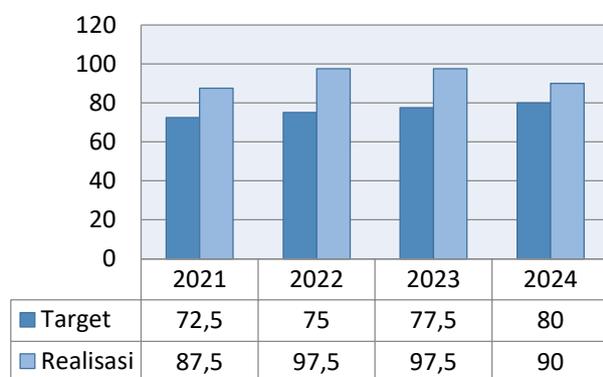
Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara lingkup Unit Eselon I yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2024 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target dan Realisasi

Tabel 35 Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

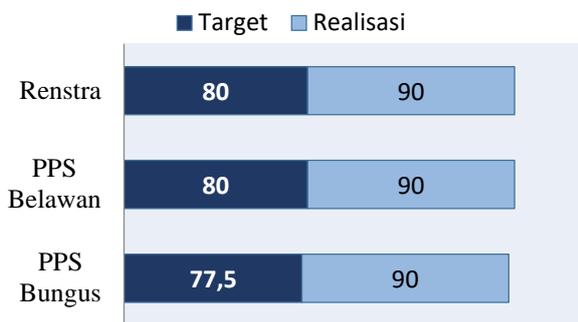
SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 15 Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	87,5	97,5	97,5	90	80	90	112,50	72,5	90



Gambar 32. Capaian PPS Bungus Tahun 2021-2024

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 90% atau 112,50% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh berdasarkan nilai capaian dari Eselon I (DJPT). Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,31% dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan, tantangan dalam pengelolaan aset, atau faktor administratif lainnya yang memengaruhi kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Oleh

karena itu, diperlukan evaluasi serta langkah strategis untuk meningkatkan kembali tingkat kepatuhan dan optimalisasi pengelolaan BMN di tahun-tahun mendatang.



Gambar 33. Perbandingan Capaian

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian tahun 2024 mencapai 116,13%. Namun, karena nilai capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada nilai capaian DJPT, maka seluruh satuan kerja (Satker) memiliki capaian yang sama, sehingga perbandingan antar Satker tidak dapat dilakukan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh pembentukan tim pengelola BMN yang bertugas dalam perencanaan, pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset secara sistematis. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku turut berperan dalam memastikan kepatuhan yang tinggi. Penerapan prosedur yang tertib dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan aset menjadi faktor kunci dalam menjaga efisiensi serta transparansi dalam pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di PPS Bungus.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja (IK) 15 dipengaruhi oleh berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Pelaporan keuangan yang tertib, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi faktor kunci dalam memastikan tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Ketepatan dalam pencatatan, validasi, dan pelaporan aset sangat berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 36. Analisa Efisiensi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	112,50%	2.880.000	2.880.000	3.240.000	360.000
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				12,5%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{12,5\%}{20} \times 50\right)$				81,25%	

Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 2.880.000. Hingga akhir tahun, anggaran tersebut telah terserap sepenuhnya, dengan tingkat penyerapan mencapai 100%. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menunjukkan hasil yang baik, dengan tingkat efisiensi sebesar 12,5% dan nilai efisiensi sebesar 81,25%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program kepatuhan pengelolaan BMN dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang serta implementasi yang disiplin dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terdiri dari 3 (tiga) orang. Tim ini meliputi 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Pengelola BMN dan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jabatan Pranata Komputer. Ketiga personel ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan BMN, mulai dari pencatatan, pemeliharaan, hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya tenaga yang kompeten dan terstruktur, pengelolaan BMN di PPS Bungus dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Indikator Kinerja (IK) 16 – Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk menilai efektivitas suatu program, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

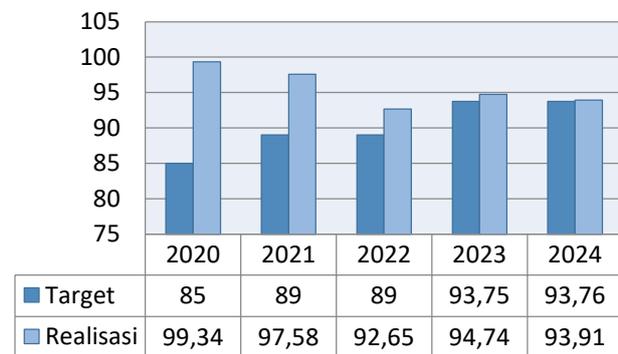
Salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja suatu Kementerian atau Lembaga. Pengukuran ini dilakukan dengan menilai kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penilaian IKPA didasarkan pada 12 indikator utama yang mencerminkan berbagai aspek dalam pelaksanaan anggaran, yaitu: Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekonsiliasi LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Dengan adanya indikator-indikator ini, pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara komprehensif, sehingga memungkinkan identifikasi potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

Target dan Realisasi

Tabel 37 Capaian Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7 Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
IK 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus									
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	99,34	97,58	92,65	93,91	93,76	93,91	100,16	89	93,91



Gambar 34. Capaian PPS Bungus Tahun 2020-2023

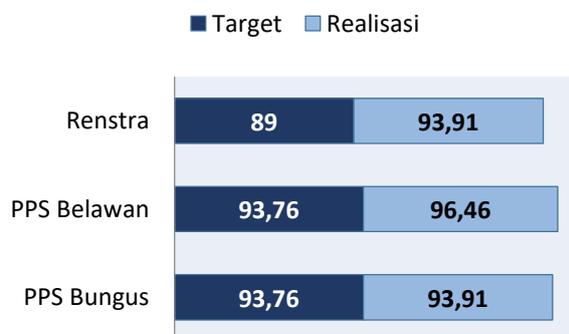
Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 93,91 atau sebesar 100,16% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target, realisasi capaian tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, nilai capaian IKPA PPS Bungus tercatat sebesar 94,74 dengan persentase pencapaian sebesar 101,06%. Penurunan ini mencerminkan adanya beberapa faktor yang mungkin memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran, seperti perubahan kebijakan, efisiensi dalam pengelolaan keuangan, atau kendala administratif yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab penurunan serta strategi perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Jika dibandingkan dengan target akhir (2024) Renstra, capaian Indikator Kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 telah mencapai 105,52%, yang menunjukkan pencapaian melampaui target yang telah ditetapkan.

Namun, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, capaian PPS Bungus masih lebih rendah sebesar 2,72%. Capaian IKPA PPS Belawan tercatat sebesar 96,46 atau 102,88% dari target yang telah ditetapkan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat penyerapan anggaran dan deviasi pada Halaman III DIPA, di mana PPS Bungus memiliki angka yang lebih rendah

Gambar 35. Perbandingan Capaian



dibandingkan dengan PPS Belawan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap selisih capaian IKPA antar satuan kerja, sehingga diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari return SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelola BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dengan komponen layanan dukungan manajemen internal untuk kegiatan layanan perkantoran.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 38. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	100,16%	12.982.960.000	12.987.260.618	13.003.732.736	16.472.118
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				0,13%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{0,13\%}{20} \times 50\right)$				50,33%	

Indikator Kinerja Nilai IKPA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 12.982.960.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 12.987.260.618 atau 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 0,13% dengan nilai efisiensi mencapai 50,33%. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun efisiensi anggaran relatif kecil, realisasi yang mencapai 100% menunjukkan perencanaan dan eksekusi anggaran yang berjalan efektif, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, didukung 6 (enam) orang pegawai yang terdiri dari 2 (dua) orang pengelola keuangan, 1 (satu) orang analis keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil,

1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, dan 1 (satu) orang Analis Pengelola Keuangan APBN Madya.

Indikator Kinerja (IK) 17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

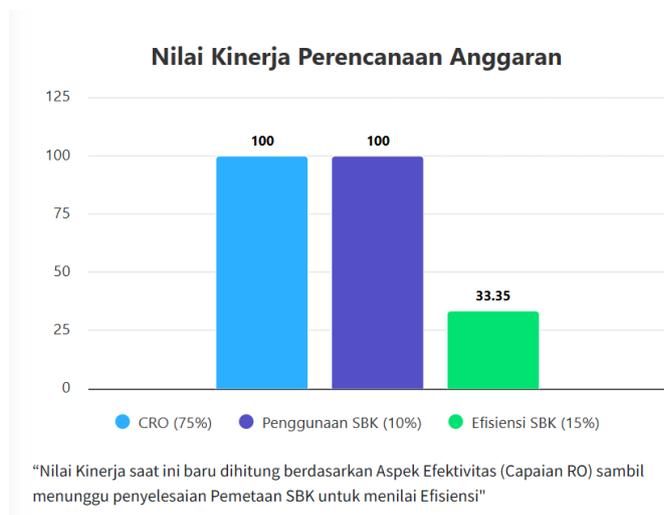
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Target dan Realisasi

Tabel 39 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	-	90	71	90	126,76	-	-



Gambar 36. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai nilai 90 dengan persentase sebesar 126% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas dalam proses perencanaan anggaran yang telah dilakukan sepanjang tahun. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya yang diukur adalah Kinerja Anggaran, sedangkan pada tahun 2024 yang dinilai adalah Kinerja Perencanaan Anggaran. Perbedaan dalam

metode pengukuran ini menyebabkan data tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan untuk analisis tren atau evaluasi peningkatan dan penurunan kinerja secara langsung. Jika dibandingkan dengan satuan kerja lainnya, seperti Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, baik target maupun capaian yang diperoleh PPS Bungus berada pada posisi yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan anggaran, kedua satuan kerja memiliki performa yang seimbang, mencerminkan adanya keselarasan dalam penerapan kebijakan dan strategi perencanaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya sinergitas tim pengelola anggaran dan petugas pelaporan online menjadi faktor yang mendukung keberhasilan indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Kegiatan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dilakukan secara rutin setiap awal bulan. Kegiatan sinkronisasi data capaian output juga dilaksanakan antara keuangan dan tim teknis.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Pelaporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek finansial terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terkelola dengan baik.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 40. Analisa Efisiensi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	126,76%	35.855.000	35.853.560	45.449.798	9.596.238
$Efisiensi\ RO\ Satker = \frac{\sum_{i=1}^n((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n(AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				26,76%	
$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50\right)$ $= 50\% + \left(\frac{26,76\%}{20} \times 50\right)$				116,9%	

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) 17 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 35.855.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 35.853.560 atau 100% dari total anggaran yang dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 26,76% dengan nilai efisiensi mencapai 116,9%. Capaian ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tingginya nilai efisiensi menunjukkan adanya strategi yang efektif dalam

pengelolaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih hemat dan efisien.

Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran PPS Bungus, didukung oleh 2 (dua) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang APK APBN Muda yang melakukan inputing realisasi capaian output di Aplikasi SAKTI, dan 1 (satu) orang PJLP yang mendapatkan penugasan sebagai operator SMART DJA.

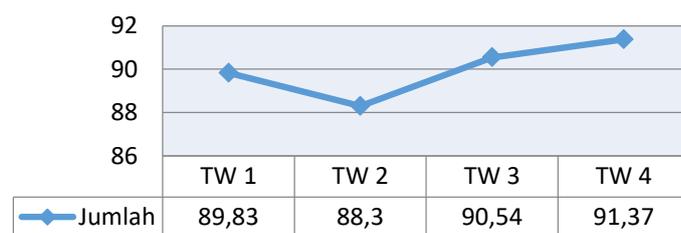
Indikator Kinerja (IK) 18 – Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target dan Realisasi

Tabel 41. Capaian Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

SK 7		Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus							
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Target dan Realisasi 2024			Renstra PPS Bungus	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
-	-	-	88,61	91,37	88,3	91,37	103,48	-	-



Gambar 37. Capaian Nilai SKM PPS Bungus Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada tahun 2024 mencapai 91,37 atau 103,48% dari target yang telah ditentukan. Grafik capaian SKM menunjukkan tren perkembangan dalam empat triwulan

sepanjang tahun 2024, mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang stabil dan meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami

peningkatan sebesar 3,03% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan yang diberikan di PPS Bungus, baik dari segi fasilitas, efisiensi pelayanan, maupun respons terhadap kebutuhan pengguna jasa. Selain itu, jika dibandingkan dengan satuan kerja lain, yaitu PPS Belawan, capaian SKM PPS Bungus juga sedikit lebih tinggi dengan selisih 0,24%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan di kedua pelabuhan relatif setara, dengan PPS Bungus memiliki keunggulan tipis dalam penilaian kepuasan pengguna. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa yang mengisi survey.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dan Key Performance Indicators (KPI). Pengukuran IKP memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan oleh pelabuhan. Data ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi kualitas layanan yang ada, tetapi juga memberikan pandangan yang lebih dalam terkait dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa.

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran

Tabel 42. Analisa Efisiensi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (Rp.) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp.) (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) -RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera	103,48%	28.061.000	28.061.000	29.037.522	976.522
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				3,48%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{Ro}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{3,48\%}{20} \times 50 \right)$				58,7%	

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera pada tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 28.061.000. Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 28.061.000 atau

100% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 3,48% dengan nilai efisiensi mencapai 58,7%. Capaian ini mencerminkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Dengan efisiensi yang cukup baik, pengelolaan anggaran dalam program peningkatan kepuasan masyarakat tetap berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Sumber Daya Manusia

Pencapaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera didukung oleh beberapa tim kerja yang berperan langsung dalam pemberian layanan kepada stakeholder dan pengguna jasa. Tim-tim kerja tersebut meliputi tim kerja dukungan manajerial, tim kerja operasional pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandaran, tim kerja pelayanan usaha, dan tim kerja sarana dan prasarana. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim kerja dukungan manajerial berperan dalam mengkoordinasikan strategi pelayanan, administrasi, dan pengelolaan sumber daya. Tim kerja operasional pelayanan usaha bertanggung jawab atas kelancaran operasional kegiatan usaha di pelabuhan. Tim kerja kesyahbandaran memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas kepelabuhanan sesuai regulasi. Tim kerja pelayanan usaha berfokus pada pelayanan langsung kepada pengguna jasa, sedangkan tim kerja sarana dan prasarana bertugas menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur serta fasilitas yang digunakan. Dukungan dari seluruh tim ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat sebagaimana tercermin dalam hasil survei. Sinergi antar tim kerja menjadi faktor utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di Pelabuhan Perikanan Samudera.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.155.295.000,-** sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2024 **Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2024 tanggal 24 November 2023**, alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan.

Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 16.150.300.768,-** atau sebesar **99,97%** dari pagu sebesar **Rp. 16.155.295.000,-**.

Tabel 43. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Anggaran Triwulan IV 2024	Persentase Realisasi Anggaran (%)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.495.548.000,-	2.487.895.536,-	99,69%
1 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	27.450.000,-	27.376.420,-	99,73%
2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.400.965.000,-	2.395.153.963,-	99,76%
3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	1.000.000,-	990.000,-	99%
4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	66.133.000,-	64.375.153,-	97,34%
Program Dukungan Manajemen	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%
5 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.659.747.000,-	13.662.405.232,-	100,02%

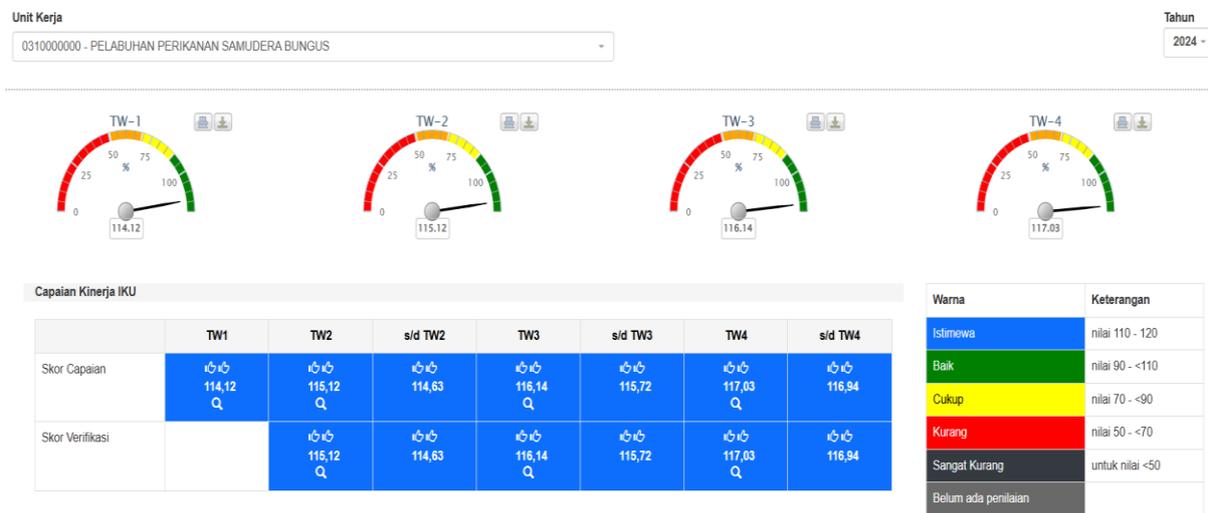
The background features a white canvas with abstract geometric patterns. In the top-left and bottom-right corners, there are circular motifs composed of concentric, interlocking lines in blue and yellow. Large, solid-colored shapes, including a blue chevron and a yellow parallelogram, are positioned on the left and right sides. A cluster of small blue dots is located on the left side, and another cluster of small blue dots is on the right side.

BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada Triwulan IV tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 117,03 persen.



Gambar 38. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan IV Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, semua Indikator Kinerja yang ditetapkan telah mencapai nilai/angka lebih atau diatas 100%.

Dalam Pelaksanaan pencapaian indikator kinerja PPS Bungus terdapat beberapa kendala/permasalahan, antara lain :

- Produksi hasil tangkapan nelayan di PPS Bungus masih belum optimal akibat banyaknya kapal yang tidak dapat melaut karena kondisi cuaca ekstrem.
- Terdapat sejumlah lahan kosong di kawasan pelabuhan yang masih belum dimanfaatkan, padahal dapat digunakan oleh stakeholder untuk mendukung kegiatan perikanan, seperti unit pengolahan ikan, gudang beku, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Frekuensi pengiriman data melalui aplikasi PIPP masih belum optimal dan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- Beberapa kapal perikanan yang akan melakukan docking masih belum memiliki dokumen yang lengkap.
- Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi Penangkapan Ikan Terukur.
- Terdapat kendala terkait alat tangkap Bagan Berperahu Teri yang sudah diakui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023, namun spesifikasinya belum tercantum dalam aplikasi Sicefi.
- Masih terdapat awak kapal perikanan yang belum memiliki sertifikat kompetensi, seperti Basic Safety Training (BST), BST-F, Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), SKN Nautika, SKN Teknika, Ankapin, dan Atkapin.

- h. Inovasi yang dapat diterapkan di PPS Bungus masih belum tersedia atau dikembangkan secara signifikan.
- i. Beberapa rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP masih berstatus pending atau dalam proses penyelesaian.
- j. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan penurunan salah satu indikator penilaian IKPA PPS Bungus dibandingkan tahun sebelumnya.
- k. Tim kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus belum berfungsi secara optimal.

Adanya kendala/permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih besar untuk dapat mencapai kinerja yang lebih optimal kedepannya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan sebagai rekomendasi upaya tidak lanjut dalam pencapaian tahun 2024.

4.2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023, terdapat rekomendasi untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi sekaligus promosi terkait lahan yang dapat di sewakan melalui media sosial maupun promosi lainnya.
- b. Menghimbau kepada pemilik atau pengurus kapal perikanan yang akan Docking untuk mengurus dan melengkapi surat perizinan yang lengkap.
- c. Menambah jumlah anggaran pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur.
- d. Melakukan koordinasi dengan pusat yaitu direktorat kapi untuk bisa mencari solusi berkaitan dengan hal tersebut.
- e. Mengupayakan pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Bagi awak kapal Perikanan seperti Basic Safety Training (BST), BST-F, Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), SKN Nautika, SKN Teknik, Ankapin dan Atkapin.
- f. Mengupayakan Inovasi Baik Base on Aplikasi maupun Non Aplikasi di Tahun 2024.
- g. Melaksanakan Percepatan dalam Penyelesaian Hasil Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP tersebut.
- h. Melaksanakan monitoring terkait Penyesuaian RPD (Halaman III DIPA) dengan melakukan kontrol pada Pelaksanaan Kegiatan secara berkala.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widodo**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Widodo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.283,2
2.	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat	2	Volume produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	6.347
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang berdaya saing	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81
4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	57
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	30,10
5.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	412
6.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (persen)	30,15
7.	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (nilai)	75
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80

	12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	94
	13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	84
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	80
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	93,76
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	71
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (Indeks)	88,30

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000,-
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.295.258.000,-
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000,-
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	112.921.000,-
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.843.200.000,-
Total Anggaran PPS Bungus Tahun 2024		Rp16.293.379.000,-

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Widodo